

EKONOMUS

JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN USAHA

Penerapan Sistem Biaya Just in Time
Pada PT. Pindad Guna Optimalisasi Biaya Produksi
Oleh: *Mirna Nurwenda*

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap
Tindak Kecurangan Karyawan Pada Perusahaan Milik Negara
Oleh: *Gun Gunawan Rachman*

Implementasi "3P" pada Jasa Perhotelan
Oleh: *Zulki Zulkifli Noor*

Kualitas Sumber Daya Manusia
Oleh: *Tanty Sondari*

Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Perbankan
Terkait UU Pajak PMK Nomor: 201/PMK-03/2007
Oleh: *Ayke Nuraliati*

Kebijakan Dividend dan Harga Saham PT. Telkom Tbk. 2001-2009
Oleh: *Soritaon*

Analisis Laporan Keuangan Internasional
Oleh: *Ari Bramasto*

Bank Syariah adalah Bank Bagi Hasil ?
Oleh: *Sri Dewi Anggadini*

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana

**JURNAL
"EKONOMUS"**

Ekonomi dan Manajemen Usaha

**Volume VIII No. 2/November 2010
ISSN: 1693-1971**

Alamat:

**Fakultas Ekonomi
Universitas Langlangbuana**

**Jl. Karapitan No. 116
Telp./Fax. (022) 4212292
Bandung - 40261**

**Susunan Personalia Kepengurusan
JURNAL "EKONOMUS"
(Ekonomi dan Manajemen Usaha)
Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana**

Pelindung:

**Rektor Universitas Langlangbuana
H. Ali Hanafiah, Drs.,M.M.**

Penasehat:

- Prof. Dr. H. Soeganda Priyatna, Drs.,MM.
- Prof. Dr. H. Soekarno, MPA.,Ph.D.
- H. Habibullah Rois, Ir.,M.Sc.,Ph.D.

Penanggung Jawab:

**Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana
Dr. H. Tatang Sulaeman, SE.**

Pimplan Redaksi:

**Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Unla
Ani Yunaningsih, SE.,M.Si.**

Dewan Redaksi Ahli:

- Ani Yunaningsih, S.E.M.Si.
- Mira Nurwenda, S.E.,Ak.,M.Si.
- Budhi Satriawan, S.E.,M.M.

Anggota Dewan Redaksi:

- Wawan Hermawan, SE.,M.Si.
 - Ari Bramasto, S.E.,Ak.
 - Yenni Indrasanti, S.E.
- Gun Gunawan Rachman, S.E.,MM.
 - Taufik Sadikin R., S.E.,MM.
 - Inne Satyawisudarini, S.E.
 - Damayanti Octavia, S.E.,MM.

Peiaksana Teknis:

- Tubagus Sofian
 - Rachmat

Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana

Bank Syariah adalah Bank Bagi Hasil ?
Oleh: *Sri Dewi Anggadini*

Analisis Laporan Keuangan Internasional
Oleh: *Ari Bramasto*

Kebijakan Dividen dan Harga Saham PT. Telkom Tbk. 2001-2009
Oleh: *Soritaon*

Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Perbankan
Terkait UU Pajak PMK Nomor: 201/PMK-03/2007
Oleh: *Ayke Nuraiti*

Kualitas Sumber Daya Manusia
Oleh: *Tany Sondari*

Implementasi "3P" pada Jasa Perhotelan
Oleh: *Zulki Zulkifli Noor*

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap
Tindak Kecurangan Karyawan Pada Perusahaan Milik Negara
Oleh: *Gun Gunawan Rachman*

Penerapan Sistem Biaya Just in Time
Pada PT. Pindad Guna Optimalisasi Biaya Produksi!
Oleh: *Mirna Nurwenda*

JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN USAHA

EKONOMUS

ISSN : 1693-1971

Volume VIII No. 2/November 2010

KATA PENGANTAR

Pembaca yang budiman, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Usaha sebagai Volume VIII Nomor 2/November 2010 ini kembali hadir dihadapan Anda. Ada beragam topik yang disajikan dalam edisi ini, mulai dari instrumen keuangan hingga topik yang berhubungan dengan Wirausaha dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Mungkin keragaman topik ini mengakibatkan tidak terkonsentrasinya pembahasan, sehingga belum mampu hadir menjadi Jurnal yang utuh, namun sebagai ajang menuangkan gagasan dan keterampilan menulis ilmiah, tetap mampu memberi kontribusi positif.

Mudah-mudahan Jurnal Ekonomi dan Manajemen Usaha kali ini memberikan informasi dan mengundang diduksi lebih lanjut dari pembaca sekalian, sehingga Jurnal Ekonomi dan Manajemen Usaha dapat menjadi wacana peningkatan kemampuan berpikir ilmiah.

Bandung, 30 Nopember 2010

Redaksi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
➤ Penerapan Sistem Biaya Just in Time pada PT. Pindad Guna Optimalisasi Biaya Produksi Oleh: Mirna Nurwenda.....	187 – 107
➤ Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Tindak Kecurangan Karyawan pada Perusahaan Milik Negara Oleh: Gun Gunawan Rachman.....	108 – 129
➤ Implementasi "3P" pada Jasa Perhotelan Oleh: Zulki Zulkifli Noor.....	130 – 143
➤ Kualitas Sumber Daya Manusia Oleh: Tanty Sondari.....	144 – 148
➤ Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Perbankan Terkait UU Pajak PMK Nomor: 201/PMK-03/2007 Oleh: Ayke Nuraliati.....	149 – 158
➤ Kebijakan Dividen dan Harga Saham PT. Telkom Tbk. 2001–2009 Oleh: Soritaon.....	159 – 172
➤ Analisis Laporan Keuangan Internasional Oleh: Ari Bramasto.....	173 – 188
➤ Bank Syariah adalah Bank Bagi Hasil ? Oleh: Sri Dewi Anggadani.....	189 – 195

PENERAPAN SISTEM BIAYA JUST IN TIME PADA PT. PINDAD GUNA OPTIMALISASI BIAYA PRODUKSI

Oleh: Mirna Nurwenda
Dosen Fakultas Ekonomi UNLA

ABSTRAK

Sistem Biaya *Just In Time* (JIT) timbul dari permintaan barang (*demand pull*) sehingga memicu dilakukannya produksi. Karena itu dengan diterapkannya system JIT akan terhindar biaya produksi yang berlebihan, sehingga perusahaan tidak boros, bahkan dapat menghemat biaya. Hal ini akan meningkatkan persaingan. Sistem ini mula-mula diterapkan pada system produksi TOYOTA, Jepang. PT Pindad sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi senjata api di Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi persaingan ini, khususnya dalam sistem biaya produksi.

Sistem JIT ini oleh PT Pindad sudah mulai diterapkan, akan tetapi tidak sampai 100% nya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian kami, di mana masih ada biaya overhead yang tidak bisa dihemat oleh PT Pindad, sehingga walaupun di satu sisi PT Pindad sudah menerapkan JIT, akan tetapi biaya overhead masih tetap tinggi, terutama selama proses produksi berjalan. Di sisi lain PT Pindad sudah memproduksi sesuai permintaan, serta persediaan yang rendah untuk barang jadi dan bahan mentah.

PENDAHULUAN

Just in time (JIT) mempunyai dua tujuan strategis, yaitu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan posisi perusahaan dalam persaingan. JIT adalah filosofi menufakturing yang mengharuskan perusahaan untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya mulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. JIT adalah sistem produksi berdasarkan *demand pull*, artinya ditarik oleh permintaan. Bila ada permintaan akan barang maka pabrik baru mulai memproduksi. Produksi dengan sistem tradisional memiliki risiko kerugian yang lebih besar karena produk yang berlebihan. Dengan adanya JIT maka pemborosan dapat dihindarkan dalam skala besar, yaitu berupa perbaikan kualitas dan biaya produksi yang rendah. Kedua hal itu menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Tujuan utama JIT adalah untuk meningkatkan laba dan

posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman.

Ide dasar sistem produksi tepat waktu yaitu menghasilkan sejumlah barang yang diperlukan pada saat diminta dengan menghilangkan segala macam bentuk pemborosan waktu yang tidak diperlukan sehingga diperoleh biaya produksi yang rendah dan melakukan proses yang berkesinambungan. JIT mulai digunakan pada sistem produksi Toyota sebagai dampak dari krisis minyak tahun 1973, kemudian banyak dipakai oleh perusahaan Jepang lainnya untuk mengantisipasi semakin variatifnya permintaan dan semakin kritisnya konsumen dalam menentukan produk yang diinginkan. Dalam JIT persediaan diminimalisir dengan tetap menjaga keberlangsungan produksi. Ini berarti bahwa bahan maupun barang tersedia dalam waktu, jumlah dan kualitas yang tepat saat diperlukan.

Pengurangan pemborosan dengan tujuan optimalisasi produksi secara keseluruhan adalah pendorong utama JIT. Hal ini juga merupakan tujuan utama dari perusahaan, baik yang menerapkan JIT maupun yang belum menerapkan.

Permasalahan

PT Pindad yang telah menerapkan JIT, terbukti dengan jumlah persediaan mendekati zero dan berproduksi sesuai permintaan, mempunyai masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana penerapan JIT di PT Pindad
2. Berapakah total Overhead pabrik dan bagaimana perbandingannya dengan total produksi.
3. Adakah hubungan antara penerapan JIT dengan biaya *overhead* pabrik yang terjadi sehingga produksi menjadi optimal.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan system biaya JIT di Indonesia, khususnya pada PT. Pindad, sehingga nantinya biaya produksi dapat optimal. Hasil penelitian ini berguna bagi perusahaan yang akan menerapkan system biaya JIT dalam upaya menghindari pemborosan.

Kerangka Pemikiran

Konsep Just In Time. Carter & Usry (2002:323) menjelaskan pengertian JIT sebagai berikut; JIT adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba di lokasi kerja pada saat dibutuhkan-tepat waktu. Produk sebaiknya diselesaikan dan tersedia bagi pelanggan disaat pelanggan menginginkannya-tepat waktu. Akibatnya beban kerja

yang berkualitas tinggi dan seimbang diperlukan dalam system JIT ini, untuk menghindari penghentian produksi yang menimbulkan biaya yang mahal dan rasa sakit hati pelanggan.

Hansen/Mowen (2002:16) mendefinisikan JIT adalah sistem tarikan permintaan (*demand-pull system*) yaitu memproduksi barang hanya ketika produk dibutuhkan dan hanya dalam jumlah yang diminta konsumen. Dari kedua pernyataan ini, JIT mempunyai aspek pokok yaitu:

1. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, misalnya persediaan sedapat mungkin nol.
2. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol, tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali, dan kepuasan pembeli dapat ditingkatkan.
3. Selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dalam meningkatkan efisiensi kegiatan.
4. Menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah.

Pembelian JIT. Pembelian JIT adalah sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Pembelian JIT dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara:

1. Mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber daya yang digunakan dalam negosiasi dengan pemasok.
2. Mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok.
3. Memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan.
4. Mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah.
5. Mengurangi waktu dan biaya untuk program-program pemeriksaan mutu.

Produksi JIT. Produksi JIT adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan. Produksi JIT dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara:

1. Mengurangi atau meniadakan barang dalam proses dalam setiap workstation atau tahapan pengolahan produk (konsep persediaan nol).

2. Mengurangi atau meniadakan lead time (waktu tunggu) produksi.
3. Secara berkesinambungan berusaha sekeras-kerasnya mengurangi biaya set-up mesin pada setiap tahapan pengolahan produk.
4. Menekankan pada penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi.

Perusahaan yang menggunakan produksi JIT dapat meningkatkan efisiensi dalam bidang:

1. Lead time pemanufakturan
2. Persediaan bahan, barang dalam proses, dan produk selesai
3. Waktu perpindahan
4. Tenaga kerja langsung dan tidak langsung
5. Ruang pabrik
6. Biaya mutu
7. Pembelian bahan.

Penerapan produksi JIT dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut:

1. Ketelusuran langsung sejumlah biaya dapat ditingkatkan.
2. Mengeliminasi atau mengurangi kelompok biaya (*cost Pools*) untuk aktivitas tidak langsung.
3. Mengurangi frekuensi perhitungan dan pelaporan informasi selisih biaya tenaga kerja dan overhead pabrik secara individual
4. Mengurangi keterincian informasi yang dicatat dalam *work tickets*.

Pemanufakturan JIT dan Penentuan Biaya Produk. Pemanufakturan JIT menggunakan pendekatan yang lebih memusat daripada yang ditemui dalam pemanufakturan tradisional. Penggunaan sistem pemanufakturan JIT mempunyai dampak pada:

1. Meningkatkan keterlacakan biaya
2. Meningkatkan akurasi penghitungan biaya produk.
3. Mengurangi perlunya alokasi pusat biaya jasa
4. Mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung
5. Mempengaruhi sistem penentuan harga pokok pesanan dan proses.

JIT dan Ketelusuran biaya Overhead. Dalam lingkungan JIT, beberapa aktivitas *overhead* yang tadinya digunakan bersama untuk lebih dari satu lini produk sekarang dapat ditelusuri secara langsung ke satu produk tunggal, manufaktur yang berbentuk sel, tenaga kerja yang interdisipliner, dan aktivitas jasa yang desentralisir adalah karakteristik utama JIT.

Tabel 1. Perbedaan antara manufaktur JIT dengan Tradisional

JIT	Tradisional
1. Sistem demand pull-through	1. Sistem push-through
2. Persediaan tidak signifikan	2. Persediaan signifikan
3. Sel-sel pemanufakturan	3. Berstruktur departemen
4. Tenaga kerja interdisipliner	4. Tenaga kerja spesialis
5. Pengendalian mutu total	5. Level mutu akseptabel
6. Desentralisasi jasa	6. Sentralisasi jasa.

Pengaruh JIT pada Penilaian Persediaan. Salah satu masalah pertama akuntansi yang dapat dihilangkan dengan penggunaan pemanufakturan JIT adalah kebutuhan untuk menentukan biaya produk dalam rangka penilaian persediaan. Jika terdapat persediaan, maka persediaan tersebut harus dinilai, dan penilaiannya mengikuti aturan-aturan tertentu untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam JIT diusahakan persediaan nol (atau paling tidak pada tingkat yang tidak signifikan), sehingga penilaian persediaan menjadi tidak relevan untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam JIT, keberadaan penentuan harga pokok produk hanya untuk memuaskan tujuan manajerial. Manajer memerlukan informasi biaya produk yang akurat untuk membuat berbagai keputusan misalnya:

1. penetapan harga jual berdasarkan cost-plus
2. analisis trend biaya
3. analisis profitabilitas lini produk
4. perbandingan dengan biaya para pesaing
5. keputusan membeli atau membuat sendiri, dsb.

Hipotesis

Hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah: "Penerapan JIT mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Biaya *Overhead*".

Objek dan Metode Penelitian

Objek penelitian adalah sistem biaya *Just In Time* yang diterapkan pada PT Pindad. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan nilai suatu variable tertentu tanpa mengadakan perbandingan atau hubungan. Metode ini digunakan untuk menjelaskan masing-masing variable dalam penelitian. Selain itu juga metode verifikatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan.

Tabel 2: Operasionalisasi Variabel Penerapan Just In Time

Konsep	Indikator	Skala
Just in time adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan	Jumlah pemasok terbatas dan dilakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok	Ordinal
	Jumlah persediaan yang kecil dalam gudang atau dalam proses	Ordinal
	Tata letak mesin pabrikasi dibuat berdasarkan sel manufaktur	Ordinal
	Karyawan mempunyai keahlian ganda	Ordinal
	Partisipasi karyawan dalam organisasi tinggi	Ordinal
	Manajer berperan sebagai fasilitator	Ordinal
	Organisasi menekankan pada <i>Total Quality Management</i>	Ordinal
	Perlunya pengurangan waktu setup mesin dan <i>lead time</i> pabrikasi secara keseluruhan	Ordinal

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Biaya Produksi Tak langsung (Overhead)

Konsep	Indikator	Ukuran	Skala
Biaya Overhead adalah semua biaya produksi selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam satu kategori yang disebut ongkos overhead	Biaya produksi tak langsung yang terjadi selama Januari 2008 sampai Juni 2009	Rupiah	Rasio

Prosedur Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selain itu digunakan juga observasi terhadap biaya overhead pabrik.

Metode Analisis

Data yang mempunyai skala ordinal dengan menggunakan skala Likert, dengan bobot nilai 5,4,3,2,1 atau pengukuran sikap dengan kisaran positif sampai dengan negative. Maka data tersebut perlu ditingkatkan menjadi skala interval dengan metode successive interval.

Analisis Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kedua variable, yaitu antara hubungan antara variable Penerapan JIT dengan Biaya Overhead.

Analisis Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson. Nilai koefisien korelasi negative berarti hubungan antara dua variable tidak searah, begitu juga sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 1 "Pemasok mengirim persediaan tepat waktu dan kualitasnya baik": mayoritas (78%) setuju bahwa pemasok barang sudah tepat waktu dalam pengiriman dan kualitasnya baik.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 2 "Jumlah pemasok terbatas dan dilakukan kontrak jangka panjang": mayoritas (78%) tidak setuju perusahaan telah melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok dan membatasi jumlahnya.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 3 "Persediaan dalam gudang jumlahnya kecil atau tereliminasi": 72% responden menjawab setuju dan 28%nya sangat setuju bahwa jumlah persediaan relative sedikit.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 4 "Persediaan barang dalam proses jumlahnya sedikit": Responden menjawab tidak setuju kalau jumlah persediaan barang dalam proses sedikit.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 5 "Tata letak pabrik dalam bentuk sel manufaktur": responden menjawab tidak setuju kalau tata letak pabrik berdasarkan sel manufaktur.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 6 "Karyawan mempunyai keahlian ganda": Karyawan tidak memiliki keahlian ganda atau tidak dilakukan pelatihan unuk mengoperasikan berbagai macam pekerjaan.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 7 "Partisipasi karyawan dalam organisasi tinggi": 72% menyatakan sangat setuju dan 28% setuju. Hal ini menunjukkan, bahwa partisipasi karyawan dalam organisasi sangat tinggi.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 8 "Manajer berperan sebagai fasilitator bagi karyawan": 83% menjawab

sangat setuju dan 17% menjawab setuju, hal ini berarti hampir seluruh responden menyatakan bahwa manajer lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada sebagai pengawas.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 9 "Organisasi menekankan pada *Total Quality Management*": Mayoritas responden menyatakan bahwa perusahaan telah menekankan pada TQM yang meliputi (1) merancang produk (2) memproduksi secara baik sesuai dengan rencana (3) mengirimkan produk ke konsumen dalam kondisi baik, dan (4) pelayanan yang baik kepada konsumen.

Jawaban responden terhadap pertanyaan Penerapan JIT 10 "Organisasi melakukan penekanan pada pengurangan waktu setup produk dan *lead time* pabrikasi secara keseluruhan": mayoritas menyetujui bahwa perusahaan telah mengharuskan perhatian terhadap pengurangan waktu setup dan waktu tunggu produk.

Biaya *Overhead* pada PT. Pindad terdiri dari 8 kelompok biaya, yaitu:

1. Beban nyata upah tak langsung
2. Beban social pabrik
3. Beban tenaga dan surplus pabrik
4. beban perbaikan dan pemeliharaan
5. Biaya umum pabrik
6. Biaya pengembangan bagian pabrik
7. Biaya angkut bahan produksi
8. Biaya penyusutan

Tabel 4. Biaya overhead PT Pindad Bulan Januari 2008 sampai Juni 2009 (dalam ribuan Rupiah)

Tahun	Bulan	Biaya Overhead (Rp)	Biaya produksi (Rp)	Persentase Overhead terhadap produksi (%)
2008	Januari	359.225	984.321	36
	Februari	213.005	514.670	41
	Maret	245.509	485.245	51
	April	224.621	701.304	32
	Mei	361.222	1.824.778	20
	Juni	288.016	796.633	36
	Juli	298.511	1.858.224	16
	Agustus	256.245	99.746	257
	September	321.405	5.517.179	6
	Oktober	301.070	31.766.305	1
	November	256.208	7.565.332	3
	Desember	455.585	12.026.787	4

Lanjutan Tabel 4.....

2009	Januari	231.292	7.519.354	3
	Februari	585.565	11.105.355	5
	Maret	916.439	52.280.078	2
	April	701.820	4.420.367	16
	Mei	252.744	15.870.660	2
	Juni	171.212	37.954.155	0,45

Setelah melalui transformasi data skala ordinal menjadi interval sesuai MSI, maka didapat data berikut ini, untuk nanti dihitung korelasinya:

Tabel 5. Perbandingan Jawaban Responden tentang Penerapan JIT dengan Biaya Overhead selama 18 bulan (Januari 2008 sd. Juni 2009)

Penerapan Just In Time	Biaya Overhead (dalam ribuan rupiah)
26,243	359.225
24,571	213.005
24,571	245.509
21,737	224.621
24,854	361.222
20,832	288.016
20,417	298.511
23,460	256.245
26,066	321.405
19,426	301.070
20,065	256.208
21,177	455.585
14,670	231.292
22,445	585.565
26,474	916.439
25,596	701.820
18,593	252.744
18,997	171.212

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui bahwa korelasi JIT dengan biaya overhead adalah positif, artinya hubungan searah. Penerapan JIT menimbulkan kenaikan biaya overhead. Hasil ini tidak diinginkan oleh Penerapan JIT. Hasil ini berarti system JIT belum diterapkan sepenuhnya oleh PT Pindad.

KESIMPULAN

1. JIT tidak diterapkan sepenuhnya oleh PT Pindad. Kekurangan yang ada pada PT Pindad adalah: (a) jumlah pemasok tidak dibatasi dan diseleksi, tidak ada kontrak jangka panjang dengan pemasok, (b) banyaknya persediaan dalam proses yang memerlukan pengerjaan ulang, (c) tata letak pabrik berbentuk departemen bukan sel sehingga diperlukan alokasi biaya dan adanya waktu tunggu yang cukup signifikan, (d) karyawan tidak dilatih untuk memiliki keahlian ganda.
2. Penerapan JIT pada PT Pindad belum bisa menekan biaya overhead pabrik. Overhead pabrik pada PT pindad sifatnya berfluktuatif dan tidak dapat diprediksi.
3. Ada hubungan yang searah atau positif antara JIT dan overhead pabrik, artinya ada JIT tapi overhead masih signifikan. Hal ini tidak diinginkan bila PT Pindad benar-benar menerapkan sistem biaya JIT.

Mirna Nurwenda, SE.,Ak.,M.Si.

adalah Dosen Tetap dan Pembantu Dekan II
Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, William K. & Usry, Milton F., 2004, *Cost Accounting*, Edisi ketigabelas, Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R., & Mowen, Maryanne M., 2005. *Management Accounting* (Akuntansi Manajemen). Edisi Ketujuh, Jakarta: Salemba Empat.
- Horngrren, Foster, Datar, 2000. *Cost Accounting A Managerial Emphasis*. Tenth Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*, Edisi ke-6, Yogyakarta: STIE YKPN
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyadi Prawirosentono, Drs.,MBA, 2002. *Total Quality Management (TQM)*, Bandung: CV Alfabeta.

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TINDAK KECURANGAN KARYAWAN PADA PERUSAHAAN MILIK NEGARA

Oleh: Gun Gunawan Rachman

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan atas pengendalian intern terhadap tindak kecurangan karyawan pada perusahaan milik negara. Objek dalam tulisan ini adalah unsur-unsur pengendalian intern meliputi: Lingkungan pengendalian (*Control environment*), Pengelolaan Risiko (*Risk Assesment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*), Sistem Informasi dan Komunikasi (*Information & communication*) dan Pemantauan (*Controlling*). Metode penelitian adalah sensus dan bersifat *explanatory*. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan *path analisis* (analisis jalur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara parsial: (a) *Control environment* yang diterapkan secara efektif mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan rasio perputaran piutang; (b) Penetapan risiko berpengaruh terhadap rasio perputaran piutang pembiayaan konsumen; (c) Aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap rasio perputaran piutang pembiayaan konsumen (d) Informasi & Komunikasi berpengaruh positif terhadap rasio perputaran piutang pembiayaan dan (e) Pengawasan juga berpengaruh positif terhadap rasio perputaran piutang pembiayaan konsumen. (2) Secara simultan, pengendalian intern berpengaruh secara positif terhadap rasio perputaran piutang, yaitu unsur-unsur pengendalian intern diterapkan secara efektif pada perusahaan pembiayaan, maka rasio perputaran piutang pembiayaan konsumen akan meningkat; (3) Rasio perputaran piutang pembiayaan konsumen berpengaruh positif terhadap rasio likuiditas perusahaan pembiayaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi dewasa ini, yang merupakan hasil dari proses pembangunan, telah membuat dunia usaha semakin semarak, kompleks, bervariasi dan sangat dinamis. Disadari atau tidak, persaingan usaha telah menjadi semakin tajam sehingga masing-masing perusahaan

berusaha dengan serius menggali segala potensi yang ada agar terus dapat survive dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi BUMN, karena BUMN merupakan salah satu pelaku utama perekonomian nasional bertujuan untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang keberadaannya diatur dengan Undang-undang (UU) No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Faisal (2002:268) paling tidak ada lima faktor yang melatarbelakangi keberadaan BUMN, yaitu bahwa BUMN diperlukan:

1. Sebagai pelopor atau perintis usaha, di mana swasta tidak tertarik untuk menggelutinya.
2. Sebagai pengelola bidang usaha yang strategis dan pelaksana pelayanan publik.
3. Sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar.
4. Sebagai sumber pendapatan negara.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Apabila ditelaah secara literatur, salah satu penyebab belum optimalnya kinerja keuangan BUMN adalah karena penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip prinsip *good corporate governance*. (I Nyoman tjager dkk, 2003:166; Laksamana Sukardi, 2005:17).

Baik buruknya *good corporate governance* BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern. Pengendalian intern mencakup segala metode, alat alat dan cara yang ditujukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketepatan data dan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, serta mendorong ditaatinya semua kebijakan yang berlaku. Saat ini pengendalian intern yang ada di BUMN belum bisa mencegah dari berbagai kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan assets perusahaan <http://www.kpk.go.id>. Karena seperti telah kita ketahui, banyak sekali ribuan Asset BUMN yang bermasalah seperti penyalah-

gunaan harta BUMN. Hal tersebut terjadi karena BUMN kurang memperhatikan aspek pengelolaan resiko yang menyangkut tindak kecurangan, termasuk risiko terjadinya kecurangan karyawan.

Saat ini bentuk kecurangan sangat banyak dan bervariasi hal tersebut dibuktikan oleh adanya hasil survey dari PwC *Global Economic Crime Survey* selama tahun 2003 sampai dengan 2005 yang perlu dicermati adalah bahwa *fraud* merupakan ancaman yang terus berkembang. Hasil dari survei tersebut, bahwa meski tingkat fraud di Indonesia mengalami penurunan sebesar 4%, dari 51% pada tahun 2003 menjadi 47% pada tahun 2005, namun demikian % tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan % global, yaitu 45% (Haryanto Sahari, Dudi M.:41). Oleh karenanya perusahaan yang beroperasi di Indonesia perlu mengevaluasi resiko fraud secara berkala.

Pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Alison, yang telah dialih-bahasakan oleh Amin Widjaya Tunggal (2008:12) dalam artikelnya yang berjudul *Fraud Auditing*, adalah sebagai berikut: "Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan".

Berdasarkan hasil survei ACFE sebanyak 67,8% pelaku kecurangan adalah karyawan yang direkrut oleh perusahaan. Menurut Leonardus J.E Nugroho, di dalam *Fraud Detection and Investigation Workhoop* (2005: 28) menyatakan bahwa: "Kecurangan karyawan adalah salah satu jenis kecurangan di mana pekerja mencurangi pemberi kerjanya dengan cara mengambil, menggelapkan, atau menyalahgunakan assets perusahaan. Penggelapan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung".

Pada umumnya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan merupakan penyalahgunaan harta (*assets misappropriation*) Menurut Arens (2005:310) mengungkapkan bahwa: "*Missaproation of Assets is fraud that involves theft of an entity's Assets. In many cases the Ammounts involved are not material to the financial statements. However, the loss of company Assets is an important*".

Menurut Haryanto S & Dudi M. (2007:57) *fraud* bisa dicegah dan dideteksi melalui *Fraud Deterrence Cycle* yang melibatkan manajemen, internal auditor, auditor eksternal dan auditor forensic.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai garis pertahanan pertama pihak manajemen harus mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud, meliputi pembentukan kultur perusahaan, kebijakan, perilaku, prosedur, pendelegasian otoritas dan pengendalian yang lahir dalam organisasi dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan serta kompleksitas perusahaan. Di mana semua hal tersebut secara alamiah sudah tercakup di dalam Pengendalian intern.

Setiap jenis dari fraud akan sangat merugikan pihak perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan melalui penerapan Pengendalian intern yang efektif. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Thomas Buckhoff (2002:64) dalam artikelnya yang berjudul *Preventing Employee Fraud by minimizing Opportunity* mengungkapkan bahwa cara terbaik untuk menghindari terjadinya tindak kecurangan adalah dengan menerapkan pengendalian intern yang efektif. Sementara itu menurut Cangemi (2003:69) pengendalian internal adalah: ".....a process, effected by an entity's board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) the effectiveness and efficiency of operations, (2) the reliability of financial reporting and (3) the compliance of applicable laws and regulations".

Sehubungan dengan hal tersebut pihak manajemen memiliki peran untuk menyusun, melaksanakan dan selalu mengawasi terus menerus jalannya Pengendalian intern. Pelaksanaan efektivitas Pengendalian intern dikatakan telah memuaskan apabila diterapkannya keseluruhan unsur-unsur Pengendalian intern. Menurut Al Haryono Yusuf (2001:257), unsur dari Pengendalian intern yang saling berkaitan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Pengelolaan risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemonitoran

Kelima komponen Pengendalian intern ini harus selalu saling berhubungan dan timbul dari proses manajemen. Apabila salah satu komponen tidak dilaksanakan dengan memadai, maka seluruh pengendalian tidak akan berjalan secara efektif.

Dari kelima komponen pengendalian intern, komponen lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari komponen pengendalian intern lainnya. Kondisi ini merupakan kondisi objektif yang ada pada organisasi. Kondisi ini ditentukan oleh pimpinan organisasi.

Keberadaan pengendalian intern merupakan upaya perusahaan untuk membangun iklim yang kondusif agar dapat menghambat dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan karena adanya Pengendalian intern yang lemah di mana pengelolaan resiko belum diterapkan secara sungguh-sungguh. Sehingga menimbulkan ribuan assets BUMN yang bermasalah. [http//](http://)

. Hal tersebut terjadi karena adanya kelemahan dalam pengendalian intern BUMN. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Amin Widjaya Tunggal (2008:10) dalam bukunya yang berjudul *Audit kecurangan (suatu Pengantar)*, menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) paling sering terjadi bila:

1. Pengendalian intern tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar.
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan.
4. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap.
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat terpecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga atau kecanduan alkohol, obat terlarang, judi yang berlebihan, atau selera yang mahal.
6. Perusahaan jatuh pada saat yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham; produk atau pelayanannya yang kuno.

Oleh karenanya BUMN harus menciptakan iklim yang kondusif pada setiap bagian dengan menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pengendalian intern.

Dengan adanya pelaksanaan pengendalian intern dapat membantu pihak manajemen dalam upaya mengambil langkah untuk untuk mengantisipasi setiap tindakan kecurangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Saran perbaikan melalui pemantauan yang ada dalam pengendalian intern akan sangat membantu pihak manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang berbuat kecurangan. Selain itu pula kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir melalui penerapan Pengendalian intern yang efektif, karena menurut Tommie Singleton (2002:29) Fraud dapat dicegah dengan mempergunakan kekuatan Pengendalian internal. Sampai saat ini *recruitment* SDM yang ada di BUMN masih dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga menyempitkan profesionalisme yang terjadi bukanlah *right man on the right place*. (Majalah Figur Edisi XIX Bulan Desember 2007)

Dari uraian tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengendalian intern mencakup metode, alat dan cara untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan karyawan. Namun keberadaan pengendalian intern pada Badan Usaha Milik Negara kemungkinan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan suatu fenomena yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Adapun fenomena yang terjadi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tindak Kecurangan merupakan ancaman yang terus berkembang.

2. Belum optimalnya kinerja BUMN, karena belum sepenuhnya menerapkan *Good Corporate Governance* yang sangat terkait dengan Pengendalian Intern.
3. Pengendalian intern yang ada di BUMN belum bisa mencegah dari berbagai kemungkinan kerusakan atau kehilangan assets perusahaan.
4. Sampai saat ini sebagian recruitment SDM yang ada di BUMN masih dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga menyempitkan profesionalisme.

Rumusan Masalah

Fenomena tindak kecurangan merupakan ancaman yang terus berkembang, belum optimalnya kinerja BUMN, pengendalian intern belum bisa mencegah dari berbagai kemungkinan kerusakan atau kehilangan assets perusahaan serta sebagian recruitment SDM masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, secara lebih spesifik dan lebih rinci dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pengendalian intern yang meliputi: Lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko oleh manajemen, aktivitas pengendalian, sistem informasi & komunikasi dan pemantauan berpengaruh secara individual/partial terhadap tindak kecurangan karyawan pada perusahaan BUMN ?
2. Apakah Pengendalian intern yang meliputi: Lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko oleh manajemen, aktivitas pengendalian, sistem informasi & komunikasi dan pemantauan berpengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap tindak kecurangan karyawan pada perusahaan BUMN ?

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Menurut Mudrajad (2001:42), variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian utama dalam suatu pengamatan, sedangkan tempat di mana variabel melekat merupakan subjek penelitian. Merujuk pada pendapat tersebut maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengendalian intern dan tindak kecurangan karyawan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif melalui pendekatan survei yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala gejala atas permasalahan yang timbul, yang dapat

dilakukan dengan cara sensus maupun sampling (Husen Umar, 2003:33).

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel bertujuan untuk mengungkapkan variabel-variabel yang terkandung di dalam masalah menjadi bagian-bagian yang terkecil sehingga dapat diketahui klasifikasi ukurannya. Dalam penelitian ini, penulis gunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel bebas (independen variabel) atau variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat (dependen variabel) variabel yang dipengaruhi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka Pengendalian Intern (X) merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan Tindak Kecurangan Karyawan merupakan variabel yang dipengaruhi (Y). Masing-masing variabel dijabarkan dalam pengertian di bawah ini:

Pengendalian intern (Variabel X) mencakup segala metode, alat-alat, dan cara-cara yang ditujukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketepatan data dan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, serta mendorong ditaatinya semua kebijakan dan aturan yang berlaku.

Tindak Kecurangan Karyawan (Variabel Y) Kecurangan karyawan adalah salah satu jenis kecurangan di mana pekerja mencurangi pemberi kerjanya dengan cara mengambil, menggelapkan, atau menyalahgunakan assets perusahaan. Penggelapan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk lebih jelasnya mengenai operasionalisasi variabel tersebut, dapat terlihat berikut ini:

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel X (Pengendalian Intern)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Pengendalian Intern	Lingkungan Pengendalian (X1) (Romney, Marshal: 2006), (Al Haryono: 2001), (Arens:2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas dan nilai etis • Komitmen atas kompetensi • Partisipasi komite audit • Filosofi dan gaya operasi manajemen • Struktur organisasi • Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 	O R D I N A L
	Penaksiran Resiko (X2) (Romney, Marshal: 2006), (Arens :2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan lingkungan operasi/politik • Adanya pelatihan tentang <i>fraud awareness</i> yang berkesinambungan yang meliputi mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko. • Restrukturisasi • Pengungkapan laporan keuangan 	
	Aktivitas Pengendalian (X3) (Arens :2005) (Bambang:1999)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan tugas yang layak • Otorisasi yang layak • Dokumen dan catatan yang layak • Pengendalian fisik • Pengecekan secara bebas 	
	Informasi dan Komunikasi (X4) (Romney, Marshal: 2006); (Al Haryono:2001), (Arens:2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Arus komunikasi Internal yang ada dalam perusahaan. • Catatan akuntansi yang mendukung informasi • Alat elektronik yang digunakan • Proses pelaporan keuangan • Melibatkan SPI dalam setiap rapat dewan komisaris 	
	Monitoring (X5) (Sawyer: 2005) (Arens:2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang direncanakan 	

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel Y (Tindak Kecurangan Karyawan

Variabel	Indikator	Skala
Tindak Kecurangan Karyawan (Y)	Penyalahgunaan Harta: <ul style="list-style-type: none"> • Mengambil • Menggelapkan • Menyalahgunakan (Leonardus;2005)	O R D I N A L
	Situasi pribadi yang menciptakan tekanan yang tidak diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Masalah keuangan yang tidak terpecahkan. • Frustrasi atau merasa diperlakukan tidak adil yang mendorong tindakan balas dendam • Nepotism • Adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan (Edwards; 2006),(Rattlif dkk;1996),(Amin;2008)	
	Keadaan perusahaan yang menciptakan tekanan yang tidak semestinya : <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik industri yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan peraturan yang berlaku • Ketergantungan pada sejumlah pelanggan dan pemasok yang terbatas • Pertumbuhan yang cepat • Meningkatnya persaingan • Terdapat banyak ayat jurnal penyesuaian dan koreksi • Lemahnya pengawasan operasi. • <i>Internal Control Simptoms</i> (Rattlif dkk.:996); (Albrecht:1996); (Amin:2008),	
	Risiko pengendalian yang spesifik: <ul style="list-style-type: none"> • Satu orang menangani semua bagian dari transaksi yang penting. • Supervisi yang buruk • Pengawasan dan tanggung jawab yang tidak jelas • Tidak ada cuti yang diharuskan.Pada saat karyawan cuti tidak ada yang menggantikan. • Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan • Pertentangan pribadi yang jelas kelihatan dalam tugas yang diberikan (Rattlif dkk:1996), (Amin:2008)	

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau *explanatory reserach* karena menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis penelitian (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995:5). Penelitian yang dilakukan adalah metode survei, yang bersumber pada data internal primer, dari para responden dalam penelitian ini langsung mengisi daftar pertanyaan yang telah peneliti dengan *skala likert*. Sedangkan analisis data yang dilakukan melalui analisis regresi berganda di mana data yang diperoleh terlebih dahulu perlu diuji *validatas* dan *reliabilitasnya*, kemudian skala pengukuran data tersebut diubah menjadi skala pengukuran interval melalui *Metode Successive Interval* (MSI).

Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data kualitatif pada penelitian tersebut yang diperoleh menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah *Summated Ratings Method* dengan menggunakan skala likert (*five likert scale*). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena penelitian (Sugiyono, 2004:86). Skala likert merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala ordinal.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan berbagai jenis pengumpulan data untuk mendukung penelitian Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)
 - a. Survei, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan kuesioner yang berisi daftar pernyataan kepada responden secara terperinci dan lengkap. Kuesioner tersebut ditujukan untuk Kepala/Wakil Satuan Pengawasan Intern, Kepala Biro dan Manager.
 - b. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan kepada pihak yang berwenang dan kompeten mengenai masalah yang diteliti.
 - c. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Namun, observasi tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat.
2. Penelitian Kepustakaan (*Literacy Research*).

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Teknik ini dilakukan dengan cara studi literature, dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literature yang

relevan dan mendukung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai landasan teoritis.

Populasi dan Sample Penelitian

Untuk menentukan populasi penelitian, penulis menentukan unit analisisnya terlebih dahulu. Unit analisis ini berkaitan dengan subyek penelitian (Mudrajat, 2003:71).

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, yang dalam hal ini berjumlah 5 BUMN. Dikarenakan yang menjadi unit analisis ini adalah perusahaan, maka subyeknya adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam Industri Strategis (BUMNIS), yang menurut portal kementerian BUMN terdiri dari:

Tabel 3.
Asumsi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis

No	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT. INTI	Jl. Moch Toha No.77 Bandung
2.	PT. LEN	Jl. Soekarno Hatta No.442 Bandung
3.	PT. PINDAD	Jl. Gatot Subroto No.517 Bandung
4.	PT. DI	Jl. Padjadjaran No.151 Bandung
5.	PT. PLN	Jl. Cikapundung Barat No2. Bandung

Sumber : Portal kementerian BUMN tahun 2009

Sementara itu berkaitan dengan pengumpulan data primer, maka penulis menentukan responden penelitian yaitu:

Tabel 4.
Asumsi Populasi Responden

Perusahaan	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Wakil Satuan Pengawasan Intern	Manajer, Kepala Divisi, Internal Auditor, Karyawan	Jumlah
PT. INTI	1	1	15	17
PT. LEN	1	1	23	25
PT. PINDAD	1	1	29	31
PT. DI	1	1	32	34
PT. PLN	1	1	13	15
Populasi	5	5	122	122

Sumber : Survei Pendahuluan

Adapun format jawaban dalam kuisioner menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 (lima) kategori jawaban. Pengaturan skor jawaban responden adalah sebagai berikut:

Keterangan	Bobot ilai (+)	Bobot Nilai (-)
Jawaban a diberi skor	5	1
Jawaban b diberi skor	4	2
Jawaban c diberi skor	3	3
Jawaban d diberi skor	2	4
Jawaban e diberi skor	1	5

Metode Analisis Data

Pada metode analisis akan dijelaskan tentang pengujian instrumen penelitian (validitas dan reliabilitas), transformasi data (*method successive interval*), alat analisis data, dan pengujian hipotesis.

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sehingga kesungguhan untuk menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan/kesahihan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (Mudrajat, 2003:151). Ada dua macam pengujian yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu: uji kesahihan (*test of validity*) dan uji keandalan (*test of reliability*).

Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya instrumen pengukuran. Di mana instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang semestinya diukur atau mampu mengukur apa yang dicari secara tepat. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995:122), Sugiyono, (1998:97), Masri Singarimbun dkk, (1995:124-140). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorelasikan skor setiap item dengan skor totalnya untuk masing-masing variabel. Skor total merupakan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua pertanyaan. Alat ukur dinyatakan valid apabila korelasi antara skor setiap item dengan skor totalnya adalah positif dan signifikan.

Uji validitas dalam penelitian ini akan menggunakan teknik korelasi *product moment* yang dirumuskan oleh Jamaluddin Ancok (dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995:137) sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \dots\dots\dots (3.1.)$$

Di mana:

- r = Koefisien korelasi antara X dan Y
- X = Skor yang diperoleh dari subyek dalam tiap item
- Y = Skor total yang diperoleh dari subyek seluruh item
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam distribusi X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam distribusi Y
- $\sum X^2$ = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor X
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y
- N = Ukuran Populasi

Valid tidaknya suatu instrumen dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya pada taraf signifikan 5%, item item yang tidak berkorelasi secara signifikan dinyatakan gugur. Dalam kaitannya dengan besarnya angka korelasi ini, koefisien validitas yang tidak begitu tinggi, katakanlah berada di sekitar 0,50 sudah dapat diterima dan dianggap memuaskan. Namun apabila koefisien validitas ini kurang dari 0,30 maka dianggap tidak memuaskan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa item dari suatu variabel dikatakan valid jika mempunyai koefisien 0,30. (Saifuddin Azwar, 2000:153)

Setelah diketahui pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian adalah valid, selanjutnya pernyataan yang dinyatakan valid tersebut diuji reliabilitasnya.

Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang valid untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Uji realibilitas dalam penelitian ini akan menggunakan teknik belah dua (*split half*) yang dirumuskan oleh **Spearman Brown** (dalam Sugiyono, 1999:278) sebagai berikut : $ri = \frac{2r_b}{1+r_b}$

Dimana : r_i = reliabilitas internal seluruh instrumen
 r_b = korelasi antara belah pertama dan kedua

Langkah-langkah uji reliabilitas teknik belah dua adalah:

- Menyajikan alat pengukur kepada sejumlah responden, kemudian dihitung validitas itemnya, Item-item yang valid dikumpulkan jadi satu, yang tidak valid dibuang.
- Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belah dengan membagi item ganjil masuk belahan pertama dan item genap masuk belahan kedua.
- Skor masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden yakni skor total untuk belah pertama dan skor total untuk belahan kedua.
- Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor total belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi product moment yang rumus dan cara penghitungannya sudah dijelaskan sebelumnya.
- Peroleh angka korelasi berasal dari angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah, maka angka korelasi yang dihasilkan lebih rendah daripada angka korelasi yang diperoleh jika alat pengukur tidak dibelah, seperti pada teknik pengukuran ulang. Oleh karena itu harus dicari angka reliabilitas untuk keseluruhan item tanpa dibelah melalui formula *Spearman Brown*. Selanjutnya hasil korelasi tersebut dilakukan uji t, dengan ketentuan $X = \text{total item ganjil}$, $Y = \text{total item genap}$.
- Selanjutnya hasil t_{hitung} dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan keputusan bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka item-item tersebut dianggap reliable.

Transformasi Data

Variabel-variabel penelitian diukur dengan menggunakan *Skala Likert*, untuk setiap pilihan jawaban diberi skor dan skor yang diperoleh mempunyai tingkat pengukuran ordinal. Seluruh variabel yang skala ordinal terlebih dahulu dinaikkan/ditransformasikan tingkat pengukurannya ke tingkat interval melalui *Method of Succesive Intervals* (Riduwan, 2006:30), dengan langkah kerja sebagai berikut:

- Perhatikan setiap item jawaban responden dari angket yang disebarkan.
- Memperhatikan f (frekuensi) responden (banyaknya responden yang memberikan respon), yaitu menentukan berapa orang responden yang mendapat skor: 1, 2, 3, 4, dan 5.
- Membagi setiap bilangan pada frekuensi dengan jumlah reponden sehingga diperoleh proporsi (P).

4. Menjumlahkan proporsi secara berurutan sehingga diperoleh proporsi kumulatif (PK).
5. Berdasarkan nilai proporsi kumulatif dicari nilai Z, dengan menggunakan tabel distribusi normal (Z).
6. Berdasarkan nilai Z, dicari nilai *density* dengan menggunakan tabel ordinal distribusi normal.
7. Menghitung *scale value* (SV) dengan rumus:

$$SV = \frac{\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at upper Limit}}{\text{Area Under Upper Limit} - \text{Area Under Lower Limit}}$$

Di mana:

Density at Lower Limit : Kepadatan Batas Bawah (D_{n-1})

Density at Upper Limit : Kepadatan Batas Atas (D_n)

Area Under Upper Limit : Daerah di Bawah Batas Atas (PK_n)

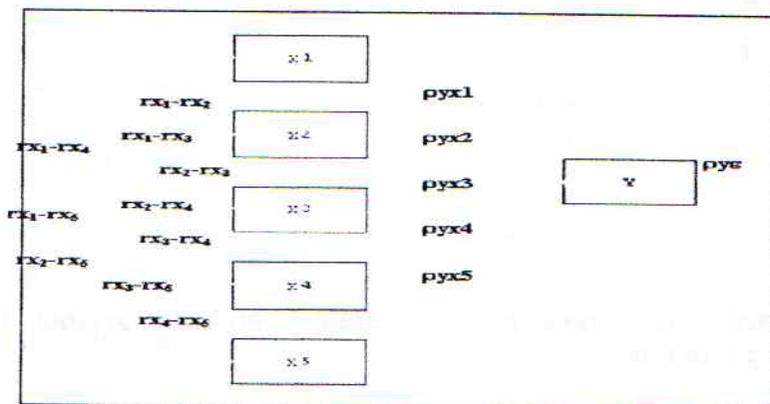
Area Under Lower Limit : Daerah di Bawah Batas bawah (PK_{n-1})

8. Tentukan nilai interval (*scala value*) untuk setiap skor jawaban dengan cara *Scale Value* yang nilainya terkecil dibuat menjadi sama dengan satu, kemudian *scale value* yang lain ditambah dengan nilai pengubah tersebut, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Transformed Scala Value} = Y = SV + |SV \text{ min}| + 1$$

Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan struktur jalur sebagai berikut:



Gambar 1.: Struktur Diagram Jalur Model Penelitian

Keterangan:

X_1 : Lingkungan pengendalian

X_2 : Pengelolaan resiko.

X_3 : Aktivitas pengendalian

X_4 : Informasi dan Komunikasi.

X_5 : Monitoring

ρ_{YX_1} : Parameter struktur yang menggambarkan kuatnya pengaruh X_1 terhadap Y .

ρ_{YX_2} : Parameter struktur yang menggambarkan kuatnya pengaruh X_2 terhadap Y .

ρ_{YX_3} : Parameter struktur yang menggambarkan kuatnya pengaruh X_3 terhadap Y .

ρ_{YX_4} : Parameter struktur yang menggambarkan kuatnya pengaruh X_4 terhadap Y .

ρ_{YX_5} : Parameter struktur yang menggambarkan kuatnya pengaruh X_5 terhadap Y .

$r_{X_2X_1}$: Koefisien korelasi yang menggambarkan hubungan X_1 dengan X_2 .

$r_{X_3X_1}$: Koefisien korelasi yang menggambarkan hubungan X_2 dengan X_3 .

$r_{X_4X_1}$: Koefisien korelasi yang menggambarkan hubungan X_3 dengan X_4 .

$r_{X_5X_1}$: Koefisien korelasi yang menggambarkan hubungan X_4 dengan X_5 .

$\rho_{Y\varepsilon}$: Parameter struktur yang menggambarkan kuatnya pengaruh faktor-faktor lain terhadap Y .

Untuk menghitung pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2), terhadap variabel dependen (Y) sebagai berikut:

1. Menentukan matrik korelasi antara variabel bebas, sebagai berikut:

$$R = \begin{matrix} & 1 & r_{x_1x_2} & r_{x_1x_3} & r_{x_1x_4} & r_{x_1x_5} \\ r_{x_2x_1} & 1 & r_{x_2x_3} & r_{x_2x_4} & r_{x_2x_5} \\ r_{x_3x_1} & r_{x_3x_2} & 1 & r_{x_3x_4} & r_{x_3x_5} \\ r_{x_4x_1} & r_{x_4x_2} & r_{x_4x_3} & 1 & r_{x_4x_5} \\ r_{x_5x_1} & r_{x_5x_2} & r_{x_5x_3} & r_{x_5x_4} & 1 \end{matrix}$$

2. Menentukan Invers Matrik Korelasi antara Variabel Bebas, sebagai berikut:

$$R_X^{-1} = \frac{1}{D} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} & K_{45} \\ K_{51} & K_{52} & K_{53} & K_{54} & K_{55} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} \end{pmatrix}$$

3. Menghitung Koefisien jalur, yang dapat ditentukan dengan melalui rumus:

$$\begin{pmatrix} \rho_{YX_1} \\ \rho_{YX_2} \\ \rho_{YX_3} \\ \rho_{YX_4} \\ \rho_{YX_5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} \\ C_{31} & C_{32} & C_{34} & C_{34} & C_{35} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{X_1Y} \\ r_{X_2Y} \\ r_{X_3Y} \\ r_{X_4Y} \\ r_{X_5Y} \end{pmatrix}$$

ρ_{YX_i} merupakan koefisien jalur dari variabel X_i terhadap variabel Y

4. Menentukan Nilai Koefisien Multiple Jalur, dengan rumus:

$$R_{Y(X_1, X_2)}^2 = (\rho_{YX_1} \quad \rho_{YX_2} \quad \rho_{YX_3} \quad \rho_{YX_4} \quad \rho_{YX_5}) \begin{pmatrix} r_{X_1Y} \\ r_{X_2Y} \\ r_{X_3Y} \\ r_{X_4Y} \\ r_{X_5Y} \end{pmatrix}$$

5. Menentukan Pengaruh variabel luar, dengan rumus:

$$\rho_{Y\epsilon_1} = \sqrt{1 - R_{Y(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)}^2}$$

Untuk menghitung pengaruh X_i terhadap Y langsung dan tidak langsung dipergunakan rumus sebagai berikut:

Pengaruh Variabel X_1 Terhadap Variabel Y :

Pengaruh X_1 Terhadap Y secara langsung = $\rho_{YX_1} \cdot \rho_{YX_1}$ =

Pengaruh X_1 Terhadap Y melalui X_2 = $\rho_{YX_1} \cdot r_{X_1X_2} \cdot \rho_{YX_2}$ = +

Pengaruh Total X_1 terhadap Y =

Pengaruh Variabel X₂ Terhadap Variabel Y :

Pengaruh X₂ Terhadap Y secara langsung = $\rho_{YX_2} \cdot \rho_{YX_2}$ =

Pengaruh X₂ Terhadap Y melalui X₁ = $\rho_{YX_2} \cdot r_{X_1X_2} \cdot \rho_{YX_1}$ = +

Pengaruh Total X₂ terhadap Y =

Pengaruh Variabel X₃ Terhadap Variabel Y :

Pengaruh X₃ Terhadap Y secara langsung = $\rho_{YX_3} \cdot \rho_{YX_3}$ =

Pengaruh X₃ Terhadap Y melalui X₁ = $\rho_{YX_3} \cdot r_{X_1X_3} \cdot \rho_{YX_1}$ = +

Pengaruh Total X₃ terhadap Y =

Pengaruh Variabel X₄ Terhadap Variabel Y :

Pengaruh X₄ Terhadap Y secara langsung = $\rho_{YX_4} \cdot \rho_{YX_4}$ =

Pengaruh X₄ Terhadap Y melalui X₁ = $\rho_{YX_4} \cdot r_{X_1X_4} \cdot \rho_{YX_1}$ = +

Pengaruh Total X₄ terhadap Y =

Pengaruh Variabel X₅ Terhadap Variabel Y :

Pengaruh X₅ Terhadap Y secara langsung = $\rho_{YX_5} \cdot \rho_{YX_5}$ =

Pengaruh X₅ Terhadap Y melalui X₁ = $\rho_{YX_5} \cdot r_{X_1X_5} \cdot \rho_{YX_1}$ = +

Pengaruh Total X₅ terhadap Y =

Pengujian Hipotesis

Menentukan pengujian keberartian untuk setiap koefisien jalur, baik secara parsial maupun simultan, sebagai berikut:

❖ Pengujian secara parsial:

Hipotesis operasional sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{YX_i} = 0$$

$$H_1 : \rho_{YX_i} \neq 0, \text{ di mana } i = 1, 2$$

Rumus pengujian yang dipergunakan apabila melalui koefisien determinasi multipel adalah:

$$t_{Xi} = \frac{P_{YXi}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{Y(Xi)}^2) (C_{ii})}{(n - k - 1)}}} ; i = 1, 2 \dots 5$$

$$\sqrt{\frac{(1 - R_{Y(Xi)}^2) (C_{ii})}{(n - k - 1)}}$$

Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n-k-1

Keterangan:

ρ_{YX_i} merupakan koefisien jalur atau besarnya pengaruh dari variabel penyebab (X_i) terhadap variabel akibat (Y)

$R^2_{Y(X_i)}$ merupakan koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua variabel penyebab (X_i) terhadap variabel akibat (Y).

C_{ii} nilai diagonal pada invers matrik untuk variabel X_i

Kriteria uji hipotesisnya adalah:

Jika t-hitung > t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Jika t-hitung < t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

❖ **Pengujian Secara Keseluruhan (Simultan)**

Hipotesis pada pengujian secara keseluruhan ini adalah:

$H_0 : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} = 0$

$H_i : \text{Sekurang-kurangnya ada sebuah } \rho_{YX_i} \neq 0$

Rumus pengujian pada koefisien jalur secara keseluruhan identik dengan menguji koefisien regresi secara keseluruhan, yaitu:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2_{Y(X_i)}) / (n - k - 1)}$$

Statistik uji di atas mengikuti distribusi F dengan derajat bebas $V_1 = k-1$ dan $V_2 = n-k-1$

Kriteria uji hipotesisnya adalah:

Jika F-hitung > F-tabel dengan $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika F-hitung < F-tabel dengan $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima, dan H_a ditolak secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk memudahkan pengolahan data dan analisis data, maka dalam penelitian ini untuk melakukan perhitungan terhadap konstanta, koefisien regresi masing masing variabel, koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (R^2) dan perhitungan lainnya yang diperlukan akan

dipergunakan paket Statistical Program For Sosial Science (SPSS 16.0 for Windows). Cara ini ditempuh mengingat pengolahan data dengan paket program tersebut lebih cepat dan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan dengan perhitungan secara manual.

Gun Gunawan R., SE.,Ak.,MM.

adalah Dosen Tetap dan Pembantu Dekan III
Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Arens. Alvin & Elder. J.Randal. 2005. *Auditing And Assurance Services An Integrated Approach*. Eleven Edition. Prentice Hall.
- Albrecht, W Steve.1996. *Employee Fraud. The Internal Auditor*, Okt 1996, 53,5; ABI/INFORM Research.
- Arens Alvin,James K Loebebecke. 2000. *Auditing Pendekatan Terpadu. Edisi Indonesia*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Al Haryono Yusuf. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN Yogyakarta.
- Amin Widjaya Tunggal. 2008. *Internal Auditing*. Penerbit Harvarindo Edisi Revisi.
- Amin Widjaya Tunggal. 2008. *Pengantar Fraud Auditing*. Edisi Revisi. Harvarindo.
- Beasley. A., 2003. *Primer for Brainstorming Fraud Risk*
- Buchoff, A. Thomas. 2002. *Preventing Employee Fraud by Minimizing Opportunity*. The CPA Journal.
- Cangemi Michael & Tommie Singleton. 2003. *Managing The Audit Function: A Corporate Audit Departement Procedures Guide. Third Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Conan C. Albrecht. W Steve Albrecht dan J.Gregory Dunn, 2000. *Conducting A Pro –Active Fraud Audit: A Case Studi* Brigham Young University, Provo. UT USA .
- Deddy S.Koesmana, Humbul Kristiawan & Ahmad Rizki. 2007. *Peran Auditor Internal Dalam Mencegah dan Mendeteksi terjadinya Fraud Menurut Standar Profesi. Economics Business & Accounting Review. FE Universitas Indonesia*.

- Faisal Basri. 2002, *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Haryanto Sahari & Dudi Kurniawan. 2007. Peran Akuntan dalam Mendeteksi dan Mencegah Fraud. *Economics Business & Accounting Review*. FE Universitas Indonesia.
- _____, 2000. *Pandangan Baru Internal Auditing*, edisi Empat, Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Hollis Ashbaugh-skaife, Daniel W Collins, William R Kinney. Jr, Ryan LaFond. 2006. *The Effect of Internal Control Deficiencies on Firm Risk and Cost of Equity Capital University of Wisconsin-Madison*
- Husen Umar. 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Ghalia Indonesia.
- I. Nyoman Tjager. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT Prenhalindo Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Jack G Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells, 1993. *The Accountants's Handbook of fraud and Commercial Crime*, John Wiley & Sons, Inc.,
- James A. Hall. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat Jakarta.
- Laksamana Sukardi. 2000. *Kinerja BUMN dinilai masih rendah*. Suara Merdeka 18 April 2002.
- Leonardus J.E.Nugroho. 2004. *Fraud Detection And Investigation Workshop*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mudrajat Kuncoro. 2001. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga.
- McMillan J.Edward, 2006. *Policies & Procedures To Prevent Fraud And Embezzlement*. John Wiley & Sons.
- Majalah Figur. 2007. *Berbagai Persoalan dalam Pengelolaan BUMN*. Edisi XIX 2007.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995. *Metode Penarikan Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Michael J.Comer, *Corporate Fraud*, Third Edition, Gower Publishing Limited, 1998.
- Nipoly, P. Thomas, *Red Flags for Fraud*. www.icon integrity consulting.
- Peterson. K.Bonita, Paul E.Zikmund. 2004. *Ten You Should Know About Fraud Strategic Finance*; May 2004;85, 11;ABI/- INFORM Research.

- Pickett, KH.Spencer. 2003. *The Internal Auditing HandBook. Second Edition*. John Wiley & Sons,Inc.
- Rae, Kirsty & Dr. Nava Subramaniam. 2006. *The Relationship between Internal Control Procedural Quality, Organisational Justice Perceptions and Employee Fraud Departement of Accounting, Finance Economics Griffith University*
- Ratliff Richard, Wanda E.Wallace, Glen E.Sumners, William Farldland & James Loebecke. 1996. *Internal Auditing Principles and Technique*. 1996. The Institute of Internal Auditors.
- Riduan Engkos achmad Kuncoro, 2006. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur*. Alfabeta.
- Romney, Marshal. 2006. *Fraud –Related Internal Controls: Complying With Sarbanes-Oxley And SAS 99*. Assosiation of Certificate Fraud Examiner.
- Sawyer, Lawrence. Mortimer A. Dittenhofer. James H. Scheiner. 2005. *Internal Auditing*. Salemba Empat.
- Singleton, Tommie. 2002. *Stop Fraud ith Powerful Internal Controls*. The Journal of Corporate Accounting & Finance; May/Jun 2002. ABI/INFORM Research.
- Suryo Pratolo 2007. *Good Corporate Governance Dan Kinerja BUMN di Indonesia: ASPEC audit. Manajemen Dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan*. FE-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tuanakotta, M.Theodorus. 2007. *Pengungkapan Fraud di Lembaga Negara: Tinjauan Teknik Audit*. *Economics Business & Accounting Review*. FE Universitas Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003.
- Wells, T. Joseph. 2006. *The Small Business Fraud Prevention Manual Course*. Assosiation of Certificate Fraud Examiner.
- Yuli Noor Kusumawati. 2001. *Benchmarking Pengendalian Internal Perusahaan Swasta PT "AT" Bagi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan BUMN sebagai upaya Peningkatan Kinerja SPI BUMN Universitas Gadjah Mada*.

IMPLEMENTASI "3 P" PADA JASA PERHOTELAN

Oleh: Zulki Zulkifli Noor
Pascasarjana Universitas Winaya Mukti

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bauran pemasaran jasa hotel non konvensional dengan kepuasan pelanggan, especially pelanggan yang meninggalkan Solar Charm Hotel di Pangandaran. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tentang pelaksanaan bauran pemasaran non konvensional, termasuk pelaksanaan sumber daya manusia, bukti fisik pelaksanaan, dan pelaksanaan proses pelayanan. Analisis pengaruh bauran pemasaran non-konvensional meliputi sumber daya manusia, bukti fisik, dan proses pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Surya Pesona Pangandaran. Untuk mempelajari komponen alat pemasaran pengaruh yang dominan antara sumber daya manusia, bukti fisik dan proses pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Surya Pesona Pangandaran. Hasilnya adalah kesopanan karyawan dan kehandalan karyawan tidak terlalu bagus, tapi bukti fisik dan proses pelayanan cukup sebagai saran pelanggan. bauran pemasaran non-konvensional memiliki dampak yang signifikan pada kepuasan pelanggan di Hotel Surya Pesona, yang berarti bauran pemasaran yang lebih tepat untuk menerapkan non-konvensional, sehingga kepuasan pelanggan di Hotel Surya Pesona harus naik. Orang atau sumber daya manusia memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan pelanggan daripada bukti fisik dan proses pelayanan.

Kata Kunci: Personal, Prasarana, Proses, Kepuasan.

ABSTRACT

Purpose of this research is to collect data and information about marketing mix non conventional hotel services with customer satisfaction, especially customer who leave at Surya Pesona Hotel in Pangandaran. The objective of research are: To know about marketing mix non conventional implementation include human resource implementation, physical evidence implementation, and service process implementation. Analysis influence marketing mix non conventional include human resource, physical evidence, and service process toward customer satisfaction at Surya Pesona Hotel in Pangandaran. To study component of marketing tools dominant influence among human resource, physical evidence and service process toward customer satisfaction at Surya Pesona Hotel in Pangandaran. The result are employee courtesy and employee reliability not too good, but physical evidence and service process have enough as a customer suggestion. Marketing mix non conventional have significant influence toward customer satisfaction at Surya Pesona Hotel, it's meant more appropriate implementing marketing mix non conventional, so customer satisfaction at Surya Pesona Hotel to be rise. People or human resource have more dominant influence toward customer satisfaction than physical evidence and services process.

Keywords: People, Physical Evidence, Process, Satisfaction.

PENDAHULUAN

Pada saat ini perekonomian negara kita sedang berada dalam keadaan krisis yang tidak menentu. Krisis ini dimulai tahun 1997 sampai sekarang, kapan krisis ini akan berakhir tidak diketahui, yang jelas negara kita sekarang sedang berusaha melakukan pemulihan (*recovery*) di segala bidang kehidupan.

Pariwisata adalah salah satu bagian dari kegiatan perekonomian negara kita yang menjadi andalan penghasil devisa yang tak kalah perannya pentingnya seperti halnya ekspor non migas dan migas. Di samping itu kepariwisataan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kehidupan kepada masyarakat di sekitar tempat objek wisata.

Salah satu unsur kegiatan di bidang kepariwisataan adalah industri jasa perhotelan. Hotel menjual jasa berupa penyediaan kamar tempat menginap/istirahat, menyediakan makanan dan minuman serta memberikan pelayanan. Di daerah objek wisata Pangandaran telah ada industri perhotelan yang menjadi andalan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis, serta memberikan sumber kehidupan dan lapangan kerja bagi rakyat/ masyarakat sekitarnya, di samping turut membantu penghasil devisa bagi negara. Namun disisilkan akhir akhir ini terdapat rata-rata penurunan tingkat hunian kamar hotel (*occupancy rate*) yang ada di Pangandaran, sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Hunian Kamar Hotel di Pangandaran Kabupaten Ciamis

Bulan	1996	1997	1998	1999	2000
Persentase (%) Rata-rata Tingkat Hunian Kamar Hotel	40.56	37.04	30.88	37.81	35.24

Sumber: BPS, 2001.

Berdasarkan Tabel 1 di atas tampak, bahwa rata-rata tingkat hunian kamar hotel di sekitar daerah pariwisata Pangandaran mengalami penurunan yang cukup berarti dari Tahun 1996 sekitar 40,56% menjadi 35,24% pada Tahun 2000. Berdasarkan sumber lain, yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa Hotel di daerah wisata Pangandaran, bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir ini rata-rata tingkat hunian hotel (*occupancy rate*) berada di bawah 50%, terutama satu-satunya hotel yang berbintang di sekitar objek wisata Pangandaran, yaitu hotel Surya Pesona padahal target minimal yang ditentukan adalah 70%. Rendahnya tingkat hunian kamar (*occupancy rate*) di duga merupakan indikator ketidakpuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan kepada mereka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Heskett, Sasser, dan Schlesinger (1997:19) dalam "*the service profit chain*" bahwa kepuasan konsumen akan menjadi faktor penentu tercapainya tujuan pemasaran yang meliputi pertumbuhan pendapatan (*revenue growth*) dan profitabilitas.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan pengaruh bauran pemasaran *non konvensional* jasa perhotelan terhadap kepuasan pelanggan khususnya yang menginap pada Hotel berbintang Surya Pesona di Pangandaran. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan bauran pemasaran *non konvensional* jasa hotel Surya Pesona yang terdiri dari petugas pelayanan, prasarana fisik, dan proses pelayanan di Pangandaran.
2. Menganalisa pengaruh bauran pemasaran *non konvensional* jasa hotel Surya Pesona yang terdiri dari petugas pelayanan, prasarana fisik, dan proses pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.
3. Mempelajari alat bauran pemasaran *non konvensional* yang paling dominan pengaruhnya di antara petugas pelayanan, prasarana fisik, dan proses pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.

Metode Penelitian

Atas pertimbangan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat **verifikatif** dan **deskriptif**. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel (bauran pemasaran jasa hotel). Sifat penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Di mana dalam penelitian ini akan diuji apakah bauran pemasaran jasa hotel berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang menginap. Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode *descriptive survey* dan metode *explanatory survey*. **Tipe penelitian** bersifat causalitas, karena akan diuji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan tak bebas. **Unit analisis** dalam penelitian ini adalah individu, karena hanya konsumen yang dijadikan responden. **Time horizon** dalam penelitian ini adalah *crosssectional*, karena informasi dari sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti.

Operasionalisasi Variabel

Seperti yang terungkap di dalam objek penelitian, bahwa pokok masalah yang diteliti adalah bersumber pada dua hal yaitu bauran pemasaran *non konvensional* jasa hotel sebagai variabel bebas (variabel X) dan kepuasan konsumen yang menginap sebagai variabel tak bebas (variabel Y). Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel untuk menjawab identifikasi masalah nomor 1 dan nomor 2 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Bauran Pemasaran <i>non conventional</i>		Suatu konsep yang menekankan pada pentingnya kualitas dari segi petugas, sarana fisik, dan prosedur.	Pelaksanaan bauran pemasaran <i>non conventional</i> jasa hotel yang meliputi petugas, sarana fisik, dan prosedur	Tingkat pelaksanaan bauran pemasaran <i>non conventional</i> jasa hotel	Ordinal
	Orang	Orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> - Penampilan petugas - Keramahan - Kecepatan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kerapihan petugas - Tingkat keramahan - Tingkat kecepatan pelayanan 	Ordinal Ordinal Ordinal
	Sarana Fisik	Merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan produk jasa yang ditawarkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi tempat pelayanan - Kondisi kamar - Papan pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan sarana - Kenyamanan sarana - Tingkat ketepatan informasi 	Ordinal Ordinal Ordinal
	Proses	Suatu upaya perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya untuk memuaskan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur chek-in - Prosedur chek-out - Prosedur penanganan keluhan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesederhanaan prosedur - Tingkat kemudahan chek-out - Tingkat kualitas penanganan keluhan konsumen 	Ordinal Ordinal Ordinal
Kepuasan Konsumen		Perbandingan antara bauran pemasaran <i>non conventional</i> jasa yang diterima konsumen dengan jasa yang diharapkan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauran Pemasaran <i>non conventional</i> yang diharapkan konsumen - Bauran Pemasaran <i>non konvensional</i> yang dirasakan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat harapan konsumen atas bauran pemasaran <i>non conventional</i> - Tingkat perasaan konsumen atas bauran Pemasaran <i>non conventional</i> 	Ordinal Ordinal

Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini ukuran sampel ditentukan oleh bentuk uji statistika yang akan digunakan. Uji statistika yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*), di mana koefisien jalur pada dasarnya adalah koefisien korelasi. Dengan demikian ukuran sampel minimal untuk

analisis jalur ini, dapat ditentukan melalui rumus ukuran sampel minimal untuk koefisien korelasi yang dilakukan secara iteratif (perhitungan berulang-ulang).

Dengan melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh parameter di mana penelitian dengan topik yang sama belum pernah dilakukan, maka diperoleh (koefisien korelasi terkecil) = 0,654. Sehingga dengan $\alpha = 0,05$, $r = 0,5$ dan $n = 0,05$ maka diperoleh ukuran sampel (n) minimal sebesar 98.

Sesuai dengan teknik penentuan sampel seperti telah dikemukakan di atas maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah minimum 98 konsumen yang menginap. Karena konsumen yang menginap yang menjadi unit pengamatan terdiri dari beberapa kelas kamar (*Suite room*, *De Luxe*, dan *standar*), maka dalam penelitian ini, penentuan sampel digunakan teknik *stratified random sampling*. Berdasarkan teknik tersebut ukuran sampel untuk masing-masing skala jasa digunakan ukuran proporsional dengan strata populasi (*proportional to size*). Sedangkan pemilihan sampel dari setiap strata populasi digunakan teknik *simple random sampling*.

Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan serta ditujukan kepada pihak perusahaan atau mewakilinya seperti Manajer Bagian Umum Hotel Surya Pesona Pangandaran.
2. Kuesioner, daftar pernyataan yang dibuat dalam bentuk sederhana dengan metode pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden (konsumen Hotel Surya Pesona), sehingga memperoleh data yang berhubungan dengan judul Jurnal.
3. Observasi, mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang tengah diteliti.

Metode Analisis

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara kuesioner dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) langkah, yaitu: persiapan, tabulasi, dan penerapan data pada pendekatan penelitian. Persiapan adalah mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner serta memeriksa kebenaran cara pengisian. Melakukan tabulasi hasil kuesioner dan memberikan nilai (*Scoring*) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner tertutup dengan menggunakan skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan indikator untuk pasangan variabel independen X_1 , X_2 , X_3 dan variabel dependen Y , yaitu

seperti berikut (X_1, Y) , (X_2, Y) , (X_3, Y) yang diasumsikan berhubungan linier. Data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui pelaksanaan bauran pemasaran *non konvensional* jasa hotel (petugas pelayanan, sarana fisik, dan prosedur) serta kepuasan konsumen, data diolah dengan menganalisis sikap responden terhadap setiap butir kuesioner untuk melihat hasil penilaian (positif/negatif) responden terhadap pelaksanaan variabel yang diteliti oleh konsumen dengan menggunakan analisis *Likert's Summated Rating*.

Karena tingkat pengukuran skala tersebut adalah ordinal, maka agar dapat diolah lebih lanjut harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Succesive Interval* (MSI). Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.

Dalam hal ini, p_{YX_1} , p_{YX_2} , ..., p_{YX_7} , merupakan koefisien jalur. Struktur hubungan variabel tersebut dapat dinyatakan ke dalam persamaan regresi, yaitu:

$$\hat{Y} = b_0 + b_{YX_1} X_1 + \dots + b_{YX_7} X_7 + e$$

Koefisien jalur dapat ditentukan melalui rumus berikut ini:

$$p_{YX_i} = b_{YX_i} \sqrt{\frac{\sum_{h=1}^n X_{ih}^2}{\sum_{h=1}^n h_h^2}}, \quad i = 1, \dots, 7$$

Keterangan:

P_{YX_i} merupakan koefisien jalur dari variabel X_i terhadap variabel Y

b_{YX_i} merupakan koefisien regresi dari variabel X_i terhadap variabel Y

Hipotesis umum penelitian ini adalah bauran pemasaran jasa hotel terhadap kepuasan konsumen. Jika hipotesis penelitian tersebut dinyatakan ke dalam hipotesis statistik adalah:

$$H_0 : p_{YX_1} = p_{YX_2} = \dots = p_{YX_3} = 0$$

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya ada sebuah } p_{YX_i} \neq 0, \quad i = 1, 2, 3$$

$$F = \frac{(n-k-1) \sum_{i=1}^k p_{YX_i} r_{YX_i}}{k \left(1 - \sum_{i=1}^k p_{YX_i} r_{YX_i} \right)}$$

Statistik uji yang digunakan adalah:

Statistik uji di atas mengikuti distribusi F Snedecor dengan derajat bebas $db_1 = k$ dan $db_2 = n - k - 1$.

Keterangan:

r_{YX_i} adalah korelasi antara variabel X_i dan Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{YX_i} = \frac{n \sum_{h=1}^n X_{ih} Y_h - \sum_{h=1}^n X_{ih} \sum_{h=1}^n Y_h}{\sqrt{\left\{ n \sum_{h=1}^n X_{ih}^2 - \left(\sum_{h=1}^n X_{ih} \right)^2 \right\} \left\{ n \sum_{h=1}^n Y_h^2 - \left(\sum_{h=1}^n Y_h \right)^2 \right\}}}, \quad i = 1, 2, \dots, 7$$

Kriteria uji, tolak H_0 jika $F \geq F_{\alpha; (k, n-k-1)}$ dengan $F_{\alpha; (k, n-k-1)}$ diperoleh dari tabel distribusi F dengan $\alpha = 5\%$, derajat bebasnya, $db_1 = k$, dan $db_2 = n-k-1$. Jika hipotesis umum dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian untuk sub hipotesis, yaitu:

1. Pelayanan petugas jasa hotel berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Hotel Surya Pesona.
2. Sarana fisik jasa hotel berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Hotel Surya Pesona.
3. Prosedur jasa hotel berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Hotel Surya Pesona.

Sub hipotesis tersebut dalam statistik adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \rho_{YX_1} = 0$ melawan $H_1 : \rho_{YX_1} \neq 0$
2. $H_0 : \rho_{YX_2} = 0$ melawan $H_1 : \rho_{YX_2} \neq 0$
3. $H_0 : \rho_{YX_3} = 0$ melawan $H_1 : \rho_{YX_3} \neq 0$

$$t_i = \frac{r_{YX_i}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{YX_1 \dots X_k}^2) C r_{ii}}{n - k - 1}}}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

Statistik Uji untuk setiap Hipotesis tersebut adalah:

Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan $db = (n-k-1)$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini mencakup analisis tiga variabel bauran pemasaran *non konvensional* yaitu sumber daya manusia, sarana fisik dan proses pelayanan sebagai variabel Independen, terhadap kepuasan pelanggan yang menginap di Hotel Surya Pesona sebagai variabel dependen. Hasil wawancara dengan sebanyak 98 orang pelanggan baik wawancara langsung dan atau mengisi formulir kuesioner yang menginap di Hotel Surya Pesona tersebut yang dijadikan sebagai responden. Adapun hubungan kausal antar sub variabel tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Berdasarkan gambar di atas, maka matriks korelasinya menjadi:

Tabel 3. Matriks Korelasi

	X1	X2	X3	Y
X1	1	0.585	0.345	0.758
X2	0.585	1	0.512	0.693
X3	0.345	0.512	1	0.481
Y	0.758	0.693	0.481	1

Matriks Invers:

Tabel 4. Matriks Invers

	X1	X2	X3
X1	1.2906	-0.1138	-0.0595
X2	-0.1138	1.1896	-0.1872
X3	-0.0595	-0.1872	1.1739

Selanjutnya akan diuji keberartian koefisien korelasi antar variabel X_1 sampai dengan X_3 dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{xixj} = 0$$

$$H_1 : \rho_{xixj} \neq 0$$

Dengan statistik uji sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{(n-k-1)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

dengan menggunakan tabel distribusi t diperoleh

$$t_{(1-\alpha/2; n-k-1)} = t_{(1-0.05/2; 90)} = 1,9877$$

maka koefisien korelasi beserta pengujiannya ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Koefisien Korelasi Setiap Variabel

Koefisien	Korelasi	Uji t	T tabel	Kesimpulan
r_{yx1x2}	0.817	13.900	1.9877	Ho Ditolak Terdapat Hubungan yang signifikan
r_{yx1x3}	0.786	12.477	1.9877	Ho Ditolak Terdapat Hubungan yang signifikan
R_{yx2x3}	0.222	2.227	1.9877	Ho Ditolak Terdapat Hubungan yang signifikan

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi di atas ternyata bahwa semua koefisien korelasi signifikan, sehingga perhitungan dapat dilanjutkan.

Koefisien jalur ditentukan melalui perumusan:

$$P_{Yx_i} = \sum_{j=1}^k CR_{ij} r_{yx_j} \quad i = 1, 2, \dots, 3$$

Dan pengaruh secara keseluruhan X_1 sampai X_3

$$\begin{aligned} R_{YX_1X_2\dots X_3}^2 &= \sum_{i=1}^k P_{YX_i} r_{YX_i} \\ &= 0.683 \end{aligned}$$

sedangkan koefisien jalur variabel lainnya diluar variabel X_1 sampai X_3 ditentukan melalui:

$$\begin{aligned} p_{Y1|1} &= \sqrt{1 - R_{YX_1X_2\dots X_3}^2} \\ &= 0.563 \end{aligned}$$

Artinya, bahwa variabel bauran pemasaran *non konvensional* secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan adalah sebesar 68,3% dan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk ke dalam penelitian.

Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh antara bauran pemasaran *non konvensional* terhadap kepuasan pelanggan yang menginap di Hotel Surya Pesona, selanjutnya akan menguji hipotesis secara keseluruhan tersebut dengan bentuk sebagai berikut:

$$H_0 = \rho_{yx1} = \rho_{yx2} = \dots = \rho_{yx3} = 0$$

H1 = Sekurang-kurangnya ada sebuah $\rho_{yxi} \neq 0$

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$F = \frac{(N - K - 1)R_{X1.X2...XN}}{K(1 - R_{X1.X2...XN})}$$

$$= 67.498$$

dari tabel distribusi F-snedecor diperoleh

$$F_{\alpha; k(n-k-1)} = F_{0,05; 7; 95} = 2.103$$

Karena $F > F_{\alpha; k(n-k-1)}$, maka H_0 ditolak, berarti dapat diteruskan pada pengujian individu dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{xixj} \leq 0$$

$$H_1 : \rho_{xixj} > 0$$

Dan statistik uji yang digunakan adalah:

$$t_i = \frac{P_{YX_i}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{YX_i \dots X_k}^2) C_{r_u}}{n - k - 1}}}, i = 1, 2, 3, \dots$$

Maka diperoleh koefisien jalur beserta pengujiannya sebagai berikut:

$$t_{(1-\alpha); (n-k-1)} = t_{0,95; 95} = 1,6608$$

Maka diperoleh koefisien jalur beserta pengujian sebagai berikut:

Tabel 6 Koefisien Jalur X1, X2, dan X3, Terhadap Y

Koefisien	Jalur	Uji t	t tabel	Kesimpulan
Pyx1	0.526	7,339	1.6608	Ho Ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan
Pyx2	0.139	2,056	1.6608	Ho Ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan
Pyx3	0.313	3,997	1.6608	Ho Ditolak, terdapat pengaruh yang signifikan

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, secara umum bauran pemasaran jasa *non konvensional* mempengaruhi kepuasan pelanggan, hal ini sesuai dengan pernyataan Haksever, Render, Russel, dan Murdick, (2000: 31-132), bahwa bauran pemasaran jasa adalah alat-alat pemasaran yang terdiri dari tujuh elemen yaitu *product (service)*, *price*, *place*, *promotion*, *participants*, *physical evidence*, dan *process* yang semua variabel-variabelnya dapat dikendalikan dan dimanifulasi oleh suatu organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Organisasi yang bergerak dibidang jasa (*service*) menggunakan bauran pemasaran jasa ini untuk membantu strategi mereka dalam mencapai kepuasan pelanggan yang akhirnya menentukan posisi persaingan (*competitive position*) pada pasar sasarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan bauran pemasaran *non konvensional* di Hotel Surya Pesona umumnya dinilai pelanggan cukup baik, tetapi unsur sumber daya manusia/ petugas pelayanan kurang baik dalam melayani mereka, ini dilihat dari kurang ramahan petugas dan kurang cepat tanggapan petugas dalam melayani pelanggan. Sedangkan prasarana fisik dan proses pelayan dilaksanakan dengan cukup baik, sehingga pihak hotel harus mempertahankan pelayanan mereka terutama pada unsur prasarana fisik dan proses pelayanan, serta meningkatkan kinerja petugas pelayanan hotel.
2. Berdasarkan pembahasan di atas, ternyata bauran pemasaran *non konvensional* berpengaruh positif dan berarti terhadap kepuasan pelanggan Hotel Surya Pesona, artinya semakin tepat implementasi bauran pemasaran *non konvensional*, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan Hotel Surya Pesona, artinya pihak hotel harus benar-benar memperhatikan bauran pemasaran *non konvensional* secara umum untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya.
3. Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa semua unsur bauran pemasaran *non konvensional* berpengaruh secara positif dan berarti terhadap kepuasan pelanggan, tetapi ternyata sub variabel bauran pemasaran *non konvensional* mengenai petugas pelayanan/ SDM memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan pengunjung Hotel Surya Pesona dari pada prasarana fisik dan proses pelayanan, sehingga pihak hotel harus memberikan prioritas perhatian yang paling tinggi terhadap petugas pelayanan.

Saran

Hotel Surya Pesona, hendaknya senantiasa mampu melakukan penanganan bauran pemasaran *non konvensional* yang berorientasi kepada kepentingan para pengunjung dengan cara mempertahankan kinerja unsur bauran pemasaran *non konvensional* yang menurut pelanggan sudah baik dalam hal ini prasarana fisik dan proses pelayanan, serta meningkatkan kinerja bauran pemasaran *non konvensional* yang menurut pelanggan kurang baik dalam hal ini petugas pelayanan (SDM). Adapun unsur bauran pemasaran yang perlu ditingkatkan kinerjanya adalah:

1. Pemberian pelatihan tentang *customer service* dan beberapa aktifitas yang hubungannya dengan pelanggan.
2. Peningkatan kemampuan petugas pelayanan dalam kecepatan pemberian pelayanan.

Dr. Zulki Zulkifli Noor, SH.,MM.,MH.
adalah Dosen Pascasarjana
Universitas Winaya Mukti Sumedang

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyid, Harun, 1998, *Statistika Terapan*, UNPAD, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Metodologi Penelitian*, Pustaka, Jogja.
- Azahari, Azril, 1998. *Karya Tulis Ilmiah: Suatu Petunjuk Penulisan Untuk Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Jakarta, USAKTI.
- Berry Leonard L. and Parasuraman A.1991, *Marketing Services*, Macmillan Inc., Englington Avenue East, New York.
- Crevens, David, 1998, *Strategic Marketing*, 4th edition, Prentice-Hall, New York.
- Gaspersz, Vincent, 1997. *Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Haksever, Cengiz, et.al, 2000, *Service Management and Operation*, Second Edition, Prentice Hall International, USA.
- Heskett, James, et.al, 1997, *The Service Profit Chane*, The Free Press, New York.

- Kotler, Philip, 2000, *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control*, Millenium Edition, Prentice Hall International, Inc. A Division of Simon & Scuster, Englewood Cliffs, Nj07632.
- Kotler, Philip, and Amstrong, 2001, *Prinsip of Marketing* Prentice Hall International, Inc. A Division of Simon & Scuster, Englewood Cliffs, Nj07632.
- Lovelock, Christoper, 1999, *Service Marketing and Management*, Prentice Hall International, Inc. New Jersey.
- Payne, Adrian, 1995, *The Essence of Service Marketing*, Prentice Hall, Inc, New Jersey.
- Sihite, Richard, 1996, *Hotel Managenet, SIC*, Jogja.
- Sulastiono, Agus, 1998, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Alfabeta, Jakarta.
- Supranto, J. 1997, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Taylor and Croin, 2003, *Journal of Service Marketing*, Emerald Library, London.
- Tjiptono, Fandi, 1997, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Yoeti, Hoka, 1999, *Hotel Customer Service*, PT. Pertja, Bandung.
- Yoeti, Hoka, 1999, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh: Tanty Sondari

ABSTRAK

Sebuah negara bisa dikatakan maju adalah karena pengelolaan Sumber Daya Manusia yang optimal sehingga bisa memajukan bidang ekonomi suatu negara. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang tentu saja SDM-nya sedang dalam tahap penggodogan.

Secara umum, SDM di Indonesia belum berkembang maksimal. Dilihat dari segi pendidikan, masih banyak orang yang menganggap pendidikan bukan sebagai kebutuhan primer, ditambah keterbatasan ekonomi yang saat ini menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Kekayaan negara Indonesia sangat berlimpah, namun habis dinikmati oleh bukan masyarakat Indonesia tetapi oleh orang-orang dari negara lain yang bisa mengolah kekayaan Indonesia dan mengeruknya sebagai lahan keuntungan bagi negaranya. Semua itu karena faktor SDM kita yang jauh tertinggal dibanding mereka.

PENDAHULUAN

Secara bertahap krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 1998 dapat dipulihkan. Berbagai konflik sosial yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi dapat terselesaikan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat konflik baik secara sukarela maupun di fasilitasi oleh pemerintah teritikad untuk menciptakan suasana damai sehingga kehidupan sosial, ekonomi secara berangsur memilih kembali. Selanjutnya gerakan separatisme di Nangroe Aceh Darussalam yang membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki tahapan penyelesaian; sedangkan aksi separatisme di Papua dan Maluku diupayakan penyelesaiannya secara komprehensif.

Sementara itu gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multidimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan transnasional yang meningkat diintensifikasinya diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dapat ditangani dengan baik dengan hukum yang berlaku. Kesemuanya ini merupakan modal yang kokoh bagi terciptanya rasa damai dan tertib dalam kehidupan

masyarakat dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di bidang ekonomi, stabilitas ekonomi terus meningkat. Sejak memasuki tahun 2002, nilai tukar rupiah relatif stabil dengan kecenderungan menguat, laju inflasi dan suku bangsa menurun, serta cadangan devisa negara. Ketahanan fiskal juga kecenderungan menguat dicerminkan dengan semakin menurunnya defisit anggaran dan stock untung pemerintah. Rangkaian kemajuan ini mendorong keyakinan untuk mengakhiri program kerjasama dengan IMF.

Dalam pada itu, di bidang pembangunan daerah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah provinsi kabupaten, dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan SDM aparatur Pemda, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislatif di daerah. Beberapa daerah secara aktif mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh. Dengan keterbatasan yang ada, beberapa wilayah tertinggal di sejumlah daerah ditangani melalui skema pengembangan permukiman transmigrasi; berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat dikembangkan di pedesaan; berbagai program pembangunan perkotaan dilanjutkan, termasuk program penanggulangan kemiskinan diperkotaan dan rehabilitas lingkungan permukiman-permukiman kumuh; serta berbagai peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan pertanahan dan ruang dihasilkan. Dengan keterbatasan negara untuk membiayai pembangunan dan jumlah penduduk yang terus bertambah, kualitas SDM tetap terjaga tercermin dari meningkatnya drajat kesehatan dan gizi serta pendidikan. Usia harapan hidup meningkat menjadi 66,2 pada tahun 2000; angka kematian bayi menurun menjadi 48/1000 kelahiran; serta angka partisipasi kasar untuk semua jenjang pendidikan dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat. Peningkatan kualitas SDM juga diikuti oleh meningkatnya kehidupan beragama di kalangan masyarakat antara lain dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang turut berperan dalam meredam konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air.

Meskipun telah dicapai kemajuan diberbagai bidang pembangunan, masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang masih cukup besar yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Rendahnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat serta Lemahnya Ketahanan Budaya**

Meskipun meningkat kualitas SDM masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ini tercermin dari menurunnya perangkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan, dan PDB per kapita riil. Berdasarkan *Human Development Report 2003*, IPN Indonesia hanya menempati urutan ke-112 dari 175 negara. Sedangkan apabila dipilih menurut jenis kelamin, dengan menggunakan indeks pembangunan Gender (IPG), Indonesia hanya menempati urutan ke-91 dari 144 negara.

Peningkatan kualitas SDM juga dihadapkan pada beban yang berat dengan masih besarnya jumlah penduduk miskin yang dalam tahun 2002 berjumlah sekitar 38,4 juta jiwa atau sekitar 18,2 persen; dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja yang di dominasi oleh lulusan SD ke bawah. Kompleksitas penanganan SDM juga semakin meningkat dengan persebaran penduduk yang tidak merata terutama di Jawa dan daerah perkotaan.

- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Rakyat, Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya**

Prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan rakyat, kehidupan beragama, dan ketahanan budaya di tempuh melalui pembangunan bidang SDM, kesejahteraan rakyat, agama, dan budaya serta pembangunan bidang-bidang lain yang terkait. Di bidang SDM, prioritas tersebut dicapai melalui upaya-upaya kokoh sebagai berikut:

Pertama, mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta memberdayakan warga dan masyarakat menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Dengan kebijakan pembangunan daerah, persebaran dan mobilitas penduduk di dorong agar lebih seimbang sesuai dengan daya dukung wilayah.

Kedua, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu diberbagai jenjang pendidikan anak dini usia didorong dalam rangka menumbuhkan kembangkan anak dan meningkatkan kesilapan anak masuk sekolah; pendidikan dasar sembilan tahun ditingkatkan sehingga seluruh anak usia 7 – 15 tahun dapat diperoleh pendidikan setidaknya-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama dengan APK sekitar 95 persen pada tahun 2008; pendidikan menengah diperluas baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai hasil dari pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Serta pendidikan tinggi ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, kualitas tenaga kerja sesuai keahlian, profesionalisme, dan kompetensinya ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Ketiga, meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan lingkungan sehat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan upaya kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan pengawasan, obat, makanan dan bahan berbahaya, serta pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Pembangunan kehidupan beragama diarahkan bagi meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama yang ditempuh dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama, pemberian fasilitas, kemudahan umat dalam menjalankan ibadahnya, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan agama.

Kualitas SDM juga didorong agar memperkuat ketahanan budaya nasional antara lain dengan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian yang beradab serta dengan mendorong apresiasi terhadap aset budaya nasional, budaya baca, dan budaya menulis didorong dengan membangun masyarakat pembaca, masyarakat belajar, dan masyarakat kritis sebagai basis pengembangan budaya keilmuan dan masyarakat yang cerdas, inovatif dan produktif. Peningkatan kualitas SDM didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana antara lain dalam penyediaan air bersih, perumahan, sarana sanitasi dasar, serta penanganan persampahan dan air limbah.

• **Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di Masa Mendatang**

Dengan dilaksanakan prioritas seperti yang telah dikemukakan pada point-point di atas yaitu dengan meningkatkan kualitas diberbagai aspek seperti SDM, kesejahteraan rakyat, kehidupan beragama, dan ketahanan budaya, maka hal tersebut akan memperbaiki kualitas SDM Indonesia serta bersaing dengan negara-negara ASEAN.

P E N U T U P

Jika bercermin pada saat sekarang, SDM Indonesia dapat ditingkatkan apabila kondisi pendidikan juga membaik / setidaknya masyarakat memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya edukasi.

Bila ingin maju ya sudah pasti jangan dulu mengedepankan pembangunan fisik tetapi pembangunan mental yaitu pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem pendidikan saat ini sedang dalam tahap perbaikan contohnya saja, batas nilai kelulusan sekolah menengah dipatok setiap tahun semakin naik sebagai penyaringan ketat agar lulusan-lulusan benar-benar berkualitas dan diperkirakan nilai batas lulus akan menyamai negara Malaysia, yaitu 6.00.

Penyusun memprediksi, bahwa setiap tahun akan semakin banyak lagi orang berbondong-bondong untuk menjadi PNS karena dengan *back- ground education* yang menengah tetap bisa bekerja di pemerintahan dengan upah regional yang kabarnya akan naik. Tetapi penyusun cukup optimis pada jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan SDM di Indonesia akan membaik seiring dengan persaingan-persaingan yang terjadi.

Satu hal yang penting juga, yaitu menghilangkan kebiasaan buruk bangsa Indonesia seperti korupsi. Memperbaiki mental bangsa dengan tidak membiasakan diri memberi uang dalam hal birokrasi agar segalanya mudah. Kita harus melatih diri mentaati peraturan yang ada dan bekerja keras dalam meraih sesuatu.

Tanty Sondari, SE.,MM.

adalah Dosen Tetap dan Sekretaris Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, SP. Malayu, 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mangkunegara, AA Anwar Prabu, 2000, *Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marwansyah dan Mukaram, 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bandung: Pusat Penerbit Administrasi Niaga.
- Saydam, Gouzali, 2000. "*Manajemen Sumberdaya Manusia*", Jakarta: Djambatan.
- Siagian, P. Sondang, 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN PERBANKAN TERKAIT UU PAJAK PMK NOMOR: 201/PMK-03/2007

Oleh: Ayke Nuraliati

ABSTRAK

Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK-03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan. Peraturan ini bertolak belakang dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 40 menyebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan pasal 41 UU yang sama, pimpinan BI atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak, maka atas peraturan tersebut banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi maka dari itu bagaimana permintaan keterangan dari pihak yang terkait merahasiakan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah tampaknya terus menggenjot pendapatan melalui sektor pajak. Buktinya baru-baru ini Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK-03/2007 tentang *Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan*.

Melalui peraturan ini, beberapa pihak, terutama perbankan, bisa diminta keterangannya bahkan diminta bukti dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan barang bukti permulaan maupun penyidikan tindak pidana perpajakan.

Kegelisahan kalangan perbankan muncul setelah Humas Depkeu mengeluarkan siaran pers tentang Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Ketentuan Merahasiakan, yang diteken Sri Mulyani Indrawati akhir Desember 2007.

Lantas, sejauhmana peraturan yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan berlaku mulai 1 Januari 2008 ini efektif mengejar para nasabah yang diindikasikan akan mengemplang kewajiban membayar pajak? Apakah peraturan tersebut akan mengganggu operasional perbankan?

Perbankan harus merahasiakan data nasabahnya tetapi ternyata dengan peraturan yang baru pihak perbankan di minta membuka data tersebut dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan barang bukti permulaan maupun penyidikan tindak pidana perpajakan

Maka dari itu penulis mencoba membuat penelitian tentang **Kewajiban menjaga kerahasiakan Perbankan Terkait UU Pajak Terkait Dengan PMK RI Nomor 201 / PMK-03/ 2007.**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.03/ 2007

Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.03/2007**

TENTANG

**TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI
PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai- mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

Mengingat : 1. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI
DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN.

Pasal 1

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki data dan informasi yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari:
 - a. Direktur Jenderal Pajak atau Penyidik; atau
 - b. Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Pasal 2

- (1) Permintaan keterangan atau bukti secara tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak, Penyidik, atau Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. keterangan dan/atau bukti yang diminta; dan
 - c. maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib

- memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat peringatan.
 - (4) Apabila permintaan dalam surat peringatan tidak juga dipenuhi, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
- tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan permintaan keterangan atau bukti yang antara lain berupa prosedur permintaan keterangan, prosedur pemanggilan pihak ketiga, prosedur permintaan bukti dan dokumen yang digunakan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Kerahasiaan Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 40 menyebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan pasal 41 UU yang sama, pimpinan BI atas permintaan Menteri Keuangan berwenang

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK-03/2007 berisi empat pasal. Kewenangan Dirjen Pajak terlihat jelas dalam Pasal 1 (ayat 1) di mana disebutkan, Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan barang bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, Dirjen Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak.

Sedangkan pada ayat 2 disebutkan, bahwa yang dimaksud pihak ketiga pada pasal 1 adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan konsultan hukum. Selain itu, termasuk dalam pihak ketiga itu adalah konsultan keuangan, pelanggan, pemasok dan/atau pihak ketiga lain yang memiliki data atau informasi yang ada hubungannya dengan tindakan wajib pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas wajib pajak.

Sedangkan dalam ayat 3 diatur, permintaan rahasia bisa ditiadakan apabila ada permintaan tertulis dari Dirjen Pajak atau penyidik dan Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Pada Pasal 2 (ayat 1) berisi dalam hal permintaan keterangan atau bukti tertulis dari Dirjen Pajak, penyidik atau Menteri Keuangan harus memuat identitas wajib pajak, keterangan/bukti yang diminta dan maksud dilakukannya permintaan keterangan atau bukti. Sedangkan ayat (2) menyatakan, *para pihak yang bisa diminta keterangan, wajib memberikan jawaban paling lama tujuh hari setelah diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti dan jika tidak dipatuhi mendapat surat peringatan (ayat 3).*

Namun, jika surat peringatan tidak diindahkan, masih menurut ayat tersebut, pihak yang bisa diminta keterangan dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (ayat 4).

Sedang pada pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan tersebut berisi ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan permintaan keterangan atau bukti dan prosedur pemanggilan pihak ketiga, yakni diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak. Sedangkan pada Pasal 4 berisi mengenai periode berlakunya peraturan ini, yaitu sejak 1 Januari 2008.

PEMBAHASAN

Menanggapi penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK-03/2007, kalangan bankir meminta agar ada kejelasan implementasi dari ketentuan tersebut. Bankir yang lain mengaku tidak masalah dengan penerbitan ketentuan ini asal diberlakukan secara adil.

Aturan yang meniadakan kewajiban merahasiakan data nasabah guna keperluan pemeriksaan tindak pidana perpajakan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan berlaku sejak 1 Januari 2008. Ketentuan ini juga berlaku bagi semua pelaku industri perbankan nasional.

Saat dimintai tanggapan mengenai pemberlakuan PMK tersebut, Dalam wawancara dengan **Progres Media komunikasi asbanda edisi 10 / tahun 1 / februari 2008** Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi mengaku tidak melihatnya sebagai persoalan serius asalkan diberlakukan secara adil. Ia juga tidak khawatir hal itu akan mengganggu upaya bank dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

"Saya pikir, kalau itu diberlakukan secara equal, nggak ada persoalan. Kecuali mungkin perlakuannya tidak sama, mungkin diperlakukan di bank daerah lain, di bank swasta lain, dan di bank BUMN lain. Nah ini akan menjadi persoalan di lapangan."

Sementara itu, Direktur Treasury Bank Lippo Gottfried Tampubolon mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran (SE) dari Bank Indonesia (BI) terkait permen tersebut. Di sisi lain, pihaknya berharap agar operasionalisasi dari permen itu benar-benar diperjelas.

"SE atau juklaknya belum ada. Tapi kalau bisa nanti diperjelas bagaimana operasionalisasi dari permen tersebut. Apakah melalui BI atau langsung ketika penyidik atau semacamnya untuk meminta data nasabah bank," kata Gottfried.

Ia menambahkan, kejelasan itu bisa menyangkut kriteria nasabah yang diminta datanya. Apakah karena mereka terlibat penggelapan pajak atau yang lain. Selama ini, sepanjang pengetahuannya, ada undang-undang *secrecy law* yang menjerat nasabah bank yang terlibat tindak kriminal. Dalam hal ini, kepolisian akan mendatangi BI untuk mendapat data-data dari bank nasabah bersangkutan.

"Tapi yang dari Depkeu itu mungkin lebih terkait pajaknya. Nah ini yang perlu diperjelas, apakah semua data nasabah perlu diberitahu atau ada kriteria tertentu," tutur dia. Kendati demikian, sebagai bank yang tunduk kepada BI, pihaknya akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bank sentral tersebut.

Senada dengan Gottfried, Managing Director Bank UOB Buana Safrullah Hadi Saleh mengatakan, tujuan dikeluarkannya aturan ini harus jelas. Pasalnya, tidak semua orang merasa nyaman dengan peraturan semacam ini.

"Memang ini bagus khususnya bagi pemerintah untuk kepentingan transparansi. Selain itu, orang memang harus jujur dengan pendapatannya. Tapi menurut saya, tidak ada orang yang mau deposito atau tabungannya diketahui orang," kata dia. Kendati demikian, Safrullah menyerahkan semua itu pada BI sebagai bank sentral yang mengatur keberadaan bank dan nasabahnya.

Jika ada permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau penyidik atau Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti terkait kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan wajib memberikan keterangan. "Keterangan itu harus diberikan paling lama tujuh hari sejak surat permintaan disampaikan, Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka Direktorat Jenderal Pajak akan melayangkan surat peringatan, dan apabila permintaan dalam surat peringatan tak dipenuhi maka pihak-pihak ketiga tersebut dapat dipidana. "Kebijakan ini diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 terutama pasal 35 ayat (3), Ini berbeda dengan UU KUP yang baru. Di sana jelas-jelas tertulis, tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terkait oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan atau berdasarkan Permenkeu. Hasilnya, Menteri Keuangan pada 28 Desember 2007 menerbitkan peraturan nomor 201/PMK-03/2007.

Yang menjadi "sumber masalah" adalah Pasal 1 ayat (3) yang selengkapnya berbunyi: Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari: Dirjen Pajak atau penyidik pajak; atau Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

Pasal 1 ayat (3) Permenkeu ini memang bisa ditafsirkan berbeda oleh pembuatnya. Ada kesan, bahwa semua kewajiban merahasiakan itu otomatis hilang atas permintaan tertulis dari Dirjen Pajak, penyidik pajak dan Menkeu. Kepala Biro Humas Depkeu tampaknya termasuk yang mempunyai kesan demikian.

Namun, bisa juga mempunyai arti lain (dan mudah-mudahan ini yang benar) bila diterjemahkan dengan lebih hati-hati. Huruf a (Dirjen Pajak dan penyidik pajak) khusus untuk data pihak ketiga kecuali bank, sedangkan huruf b (wewenang Menteri Keuangan) berlaku bila *menyangkut kerahasiaan bank*.

Meski demikian, memang ada beberapa catatan atas materi Permenkeu ini yang tampaknya kurang selaras dengan UU KUP. Catatan tersebut di antaranya adalah:

Pertama, UU menyebutkan permintaan data tersebut hanya dalam rangka pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Namun dalam Permenkeu No.2017PMK.03/2007 disebutkan: (1) pemeriksaan pajak, (2) pemeriksaan bukti permulaan, (3) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan (4) penagihan pajak. UU KUP tidak menyebut "pemeriksaan bukti permulaan".

Kedua, Permenkeu ini memperluas pihak yang bisa meminta data, termasuk penyidik pajak. Padahal UU hanya menyebut Dirjen Pajak. Penyidik pajak sama sekali tidak disebut.

Kerahasiaan bank dan peraturan nomor 201/PMK.03/2007 dapat berjalan dengan baik karena hal itu hanya dapat diberikan jika adanya indikasi kecurigaan dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak hal itu akan berdampak baik di era keterbukaan ini seperti yang di dengungkan SBY berantas Korupsi.

Kerahasiaan bank dan peraturan nomor 201/PMK-03/2007 tidak bertentangan karena hal itu bisa dilakukan dengan adanya indikasi yang ketat dari dirjen pajak dan menteri keuangan yang diberikan hanya benar-benar untuk rekening yang dicurigai dalam pemeriksaan, penyidikan, penagihan pajak.

Hal ini sebagai upaya penegakan hukum pajak yang efektif yaitu penegakan hukum pajak yang bertujuan memberi peringatan kepada wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan yang kedua penegakan hukum pajak yang memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Sudah tak ada lagi yang bisa menghindari dari incaran aparat pajak. Sebab, Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan yang mewajibkan bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, dan pihak lain, membuka segala data nasabah serta klien yang mereka miliki ke aparat pajak.

Inilah cara pemerintah menggedor dan mengejar kepatuhan wajib pajak. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan dan Bukti dari Pihak yang Terkait Kewajiban Pajak, dan mulai berlaku 1 Januari 2008.

Peraturan Menkeu mengancam, jika mereka menolak menyerahkan data-data nasabah sesuai permintaan aparat pajak, mereka bisa terkena sanksi penjara serta denda. Ancamannya adalah penjara maksimal selama satu tahun atau denda sebesar Rp 25 juta.

Memang, khusus untuk membuka data nasabah perbankan, Menkeu harus meminta izin ke Bank Indonesia. Nah, bank sentral yang nanti memerintah bank untuk memberikan data nasabah ke aparat pajak.

Namun, aturan ini memberi batas waktu maksimal tujuh hari sejak ada permintaan itu. "Bila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, Ditjen

Pajak akan melayangkan surat peringatan. Jika tidak dipenuhi juga, mereka dapat dipidana

Makanya bank tidak usah takut akan peraturan yang baru mereka tidak akan kehilangan nasabahnya selama ini bank memang tempat menyimpan uang yang aman. nasabah akan tetap menyimpan, menyimpan dan bertransaksi keuangan melalui bank selama bank itu dapat di percaya oleh mereka. Peraturan yang baru tidak akan berdampak significant terhadap usaha perbankan. Peraturan yang baru akan membuat pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak tidak bisa menghindari dari kewajiban membayar pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.-03/2007 ini akan membuat pemeriksaan dan penyidikan pajak menjadi lebih mudah karena hal ini membantu pemeriksa dan penyidik pajak menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan di dalam melakukan penyidikan guna mencari dan mendapatkan bukti adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan tersangkanya. Hal ini sebagai imbas dari peraturan perpajakan indonesia dengan sistem *self assesment* memberikan kewenangan yang besar dari wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Peraturan ini sebagai upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*) di bidang perpajakan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan undang-undang pajak.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 201/PMK-03/2007 ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka menggenjot penerimaan di sektor perpajakan sebagai imbas dari sistem perpajakan *self assesment* di mana wajib pajak dituntut untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Wajib pajak dengan peraturan ini diharapkan tidak melakukan kecurangan dalam melaporkan pajak terhutangnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 201/PMK-03/2007 ini dibuat agar wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan dan tidak menghindari pajak terhutangnya. Peraturan ini tidak akan bisa berlaku apabila tidak ada ijin dari Menteri Keuangan RI, maka sebetulnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan perbankan, bahkan membantu fiskus pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak maka masyarakat selama patuh pada peraturan tidak usah takut pada peraturan ini.

Ayke Nuraliati, SE.,Ak.

adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Langlangbuana Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Supriyanto, Eko Nopiansah melalui <[http://www. TEMPO Interaktif.-com](http://www.TEMPO Interaktif.com).
- Ary Zulkarnaen, 2008, Progres Media Komunikasi asbanda edisi 10/tahun /Februari 2008.
- Nasrudin, 2008, Progres Media Komunikasi asbanda edisi 10 / tahun 1 / februari 2008.
- Republikl Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.
- <<http://www.Bisnis Indonesia.com>

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN HARGA SAHAM PT. TELKOM Tbk. 2001-2009

Oleh: Soritaon

ABSTRAK

Kebijakan dividen dari suatu perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dari perusahaan itu sendiri. Karena melalui pembagian dividen, para investor mendapat gambaran tentang keadaan perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan. Pembagian dividen kepada para pemegang saham merupakan keberhasilan para pemegang otoritas keuangan perusahaan di dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham.

Keputusan dividen menyangkut keputusan pembagian laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimalkan harga saham.

PENDAHULUAN

Pihak manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap EAT (*earning after tax*) atau penghasilan bersih sesudah pajak, yakni: 1) dibagi kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen, dan 2) diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan (*retained earning*).

Pada umumnya sebagian EAT dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali. Artinya, manajemen harus membuat keputusan tentang besarnya EAT yang dibagikan sebagai dividen. Pembuatan keputusan tentang dividen ini disebut kebijakan dividen (*dividend policy*).

Kebijakan dividen akan berpengaruh positif terhadap nilai saham, melalui penciptaan keseimbangan di antara dividen saat ini dan laba ditahan sehingga mampu memaksimalkan nilai saham. Jika perusahaan bersangkutan menjalankan kebijakan untuk membagikan tambahan tunai maka akan cenderung meningkatkan harga saham, namun jika nilai dividen tunai meningkat maka makin sedikit dana yang tersedia untuk reinvestasi sehingga tingkat pertumbuhan perusahaan yang diharapkan

untuk masa mendatang akan rendah, dan hal ini akan menurunkan harga saham. Nilai saham akan maksimal jika terjadi keseimbangan antara dividen saat ini dan laba ditahan.

Dalam menentukan kebijakan dividen tersebut maka perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor kebijakan tersebut adalah posisi solvabilitas, posisi likuiditas, tingkat pengembalian dan ukuran perusahaan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen tersebut maka perusahaan dapat membuat kebijakan dividen yang optimal, yaitu kebijakan dividen yang mencapai suatu keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang dan memaksimalkan harga saham perusahaan.

TINJAUAN TEORI

Dividen

Stice et al. (2004:902) menyatakan, bahwa dividen adalah pembagian kepada pemegang saham dari suatu perusahaan secara proporsional sesuai dengan jumlah lembar saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik.

Sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai (*cash dividend*), Lukas Setia Atmaja (2003:292) mengemukakan bahwa perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara *stock dividend*, *stock split* maupun *stock repurchase* seperti di bawah ini:

- a. *Stock dividend* adalah pembayaran tambahan saham (dividen dalam bentuk saham) kepada pemegang saham. *Stock dividend* tidak lebih dari penyusunan kembali modal perusahaan (rekapitalisasi perusahaan), sedangkan proporsi kepemilikan tidak mengalami perubahan. *Stock dividend* digunakan pada saat perusahaan ingin menghemat kas atau pada saat perusahaan kesulitan uang. Perusahaan menghemat kas untuk dapat mengambil proyek-proyek yang menguntungkan.
- b. *Stock split* adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat proporsional dengan penurunan nilai nominal saham. Tujuan *stock split* adalah untuk menempatkan harga saham agar tetap berada pada *optimal price range* atau harga pasar optimal untuk menjaga agar saham tetap diperjualbelikan banyak orang. Harga saham yang terlalu tinggi akan menyulitkan investor kecil untuk membeli saham tersebut sehingga menurunkan *demand* untuk saham tersebut di pasar sekunder.

c. *Stock repurchase* adalah pembelian kembali saham perusahaan. Sering perusahaan harus melakukan *repurchasing stock* karena perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Alasan lain karena perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Dalam kondisi tidak ada kesempatan investasi yang *favourable*, maka pemberian dividen atau pembelian saham – tidak ada pajak dan biaya transaksi – bagi investor akan sama saja. Dengan pembelian kembali maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang dan dividen per lembar saham akan lebih besar, akhirnya harga saham akan meningkat. Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk membeli kembali saham:

- 1) Saham dapat dibeli pada pasar terbuka (pendekatan *open market*). Di sini perusahaan membeli sahamnya sendiri melalui pialang saham. Pendekatan ini dapat menyebabkan kenaikan harga saham yang dibeli dan ada biaya komisi.
- 2) Perusahaan membuat penawaran formal untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga yang telah ditetapkan (pendekatan *tender offer*). Biasanya harga beli ditetapkan di atas harga pasar guna menarik investor untuk melepas sahamnya.
- 3) Perusahaan membeli sejumlah sahamnya kembali dari satu atau beberapa pemegang saham besar (pendekatan *negotiated basis*).

Sementara dalam *website* <http://id.wikipedia.org/wiki/Dividen>, dividen dapat dibagi menjadi empat jenis:

1. Dividen tunai; metode paling umum untuk pembagian keuntungan. Dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya.
2. Dividen saham; cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki. Contohnya, setiap 100 saham yang dimiliki, dibagikan 5 saham tambahan. Metode ini mirip dengan *stock split* karena dilakukan dengan cara menambah jumlah saham sambil mengurangi nilai tiap saham sehingga tidak mengubah kapitalisasi pasar.
3. Dividen properti; dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan.
4. Dividen interim; dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir.

Sugiyarso (2005:101) menjelaskan pengertian kebijakan deviden, yaitu "Keputusan pihak manajemen untuk menentukan perlakuan terhadap *earning after tax* (EAT), apakah dibagikan sebagai deviden atau sebagian lagi diinvestasikan kembali ke perusahaan, itulah yang disebut

kebijakan dividen (*dividend policy*). Adapun Persentase dividen yang dibagi dari EAT disebut *Dividend Payout Ratio* (DPR).

Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dividen (<http://kumpulan-artikelekonmi.blogspot.com/2009/06/dividen.html>):

1. Posisi likuiditas perusahaan, karena dividen merupakan "*cash outflow*" maka makin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, berarti makin besar kemampuan untuk membayar dividen. Dengan sendirinya likuiditas perusahaan ditentukan oleh keputusan-keputusan di bidang investasi dan cara pemenuhan kebutuhan dananya. Maka dapat dikatakan bahwa makin kuat posisi likuiditas perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di masa depan, makin tinggi *dividend payout ratio*-nya.
2. Kebutuhan dana untuk membayar utang, apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba ditahan, berarti perusahaan memperkecil pembayaran dividen. Dengan kata lain perusahaan menetapkan *dividend payout ratio* yang rendah.
3. Tingkat pertumbuhan perusahaan, makin cepat pertumbuhan perusahaan berarti makin tinggi pula dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Pada situasi ini biasanya perusahaan lebih suka menahan labanya daripada dibayarkan sebagai dividen, hal ini berarti makin rendah *dividend payout ratio* nya. Apabila perusahaan telah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber dana pasar modal atau yang lainnya maka perusahaan dapat menetapkan *dividend payout ratio* yang tinggi.
4. Pengawasan terhadap perusahaan, memercayakan pada pembelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, hal ini berarti mengurangi *dividend payout ratio*-nya.

Menurut Abdul Halim (2004:94), 4 (empat) bentuk pembayaran dividen yaitu:

1. Dividen dalam jumlah rupiah stabil
Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan pembayaran dividen yang stabil, artinya dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Pembayaran dividen yang stabil ini dapat memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa mendatang.
2. Dividen dengan rasio pembayaran konstan
Beberapa perusahaan melakukan pembayaran dividen berdasarkan persentase tertentu dari laba. Karena laba berfluktuasi, maka

menjalankan kebijakan ini akan berakibat jumlah dividen dalam rupiah akan berfluktuasi.

3. Dividen tetap yang rendah ditambah dividen ekstra
Pembayaran dividen ini hanyalah merupakan modifikasi dari kedua bentuk pembayaran di atas. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas pada perusahaan tetapi mengakibatkan investor sedikit ragu-ragu tentang berapa besarnya dividen mereka. Apabila laba perusahaan sangat berfluktuasi, kebijakan ini akan merupakan pilihan terbaik. Bentuk pembayaran ini menunjukkan bahwa pola peningkatan (penurunan) *dividend per share* mengikuti pola peningkatan (penurunan) *earning per share*.
4. Dividen residual
Tingkat dividen yang dibagikan perusahaan setiap tahunnya berdasarkan besarnya laba residual setelah kebutuhan investasi perusahaan atau dana yang dibutuhkan telah terpenuhi. Dengan kata lain, pola peningkatan (penurunan) *dividend per share* tidak mengikuti pola peningkatan (penurunan) *earning per share*.

Saham

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:6), "Saham (*stock atau share*) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas".

Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Penghasilan yang dinikmati oleh pembeli saham adalah pembagian dividen ditambah dengan kenaikan harga saham (*capital gains*). Dipandang dari segi kepastian, maka penghasilan pemilik saham menjadi lebih tidak pasti. Hal ini disebabkan karena pembayaran dividen sendiri akan dipengaruhi oleh prospek perusahaan yang tidak pasti.

Pada dasarnya harga pasar saham dipengaruhi oleh profitabilitas di masa yang akan datang dan risiko yang ditanggung oleh pemodal (Husnan, 2005:280).

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:7), saham dibagi menjadi dua:

1. Saham Biasa (*Common Stock*), memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Saham biasa menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa)
 - b. Dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba

- c. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (*one share one vote*)
 - d. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya
 - e. Pemegang saham biasa memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.
2. Saham Preferen (*Preferred Stock*), memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Saham preferen lebih aman dibandingkan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan
 - b. Pembagian dividen didahulukan daripada saham biasa
 - c. Saham preferen sulit diperjualbelikan karena jumlahnya sedikit
 - d. Merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi).
 - e. Persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada 3 hal:
 - 1) Ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya
 - 2) Dividen tetap selama masa berlaku dari saham
 - 3) Memiliki hak tebus, dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa

Ada beberapa risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan sahamnya, menurut **Darmadji dan Fakhruddin** (2006:13) adalah:

1. Tidak mendapat dividen
Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika mengalami kerugian. Dengan demikian, potensi ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut.
2. Mengalami *capital loss*
Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan *capital gain* atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya investor harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. Dengan demikian, seorang investor mengalami *capital loss*. Dalam jual beli saham, terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang semakin besar seiring terus menurunnya harga saham, maka seorang investor rela menjual sahamnya dengan harga rendah. Istilah ini dikenal dengan penghentian kerugian (*cut loss*).

Di samping risiko di atas, seorang pemegang saham juga masih dihadapkan dengan potensi risiko lainnya, yaitu:

1. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi
Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, jika sebuah perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis

saham tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau *di-delist*. Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah dibanding kreditor atau pemegang obligasi dalam pelunasan kewajiban perusahaan. Artinya, setelah semua aset perusahaan tersebut dijual, terlebih dahulu akan dibagikan kepada para kreditor atau pemegang obligasi, dan jika masih terdapat sisa baru dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Saham *di-delist* dari bursa

Umumnya saham *di-delist* dari bursa karena kinerja yang buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan efek di bursa.

3. Saham dihentikan sementara (*suspensi*)

Jika suatu saham *di-suspend* atau dihentikan perdagangannya oleh otoritas Bursa Efek, yang menyebabkan investor tidak dapat menjual sahamnya hingga *suspense* tersebut dicabut. *Suspensi* biasanya berlangsung dalam waktu singkat, misalnya satu atau dua sesi perdagangan, namun dapat pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. Hal tersebut dilakukan otoritas bursa jika suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan dipailitkan oleh kreditornya, atau berbagai kondisi lain yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan perdagangan saham tersebut untuk sementara sampai perusahaan yang bersangkutan memberikan informasi yang jelas sehingga tidak menjadi ajang spekulasi.

PEMBAHASAN

Kebijakan Dividen PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Periode 2001 - 2009

Pembagian dividen kepada para pemegang saham TELKOM diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham TELKOM. Untuk dividen interim, TELKOM mengakui sebagai kewajiban berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

**Rasio Pembayaran Dividen TELKOM
Periode 2001 Sampai Dengan 2009**

Tahun Dividen	Jumlah Dividen (Rp juta)	EAT (Rp juta)	Rasio Pembayaran (%)
2001	2.125.055	4.068.000	52,2
2002	3.338.109	8.040.000	41,5
2003	3.043.614	6.087.000	50
2004	3.064.604	6.129.000	50
2005	4.400.090	7.994.000	55
2006	6.053.067	11.006.000	55
2007	8.999.913	12.857.000	70
2008	5.840.708	10.620.000	55
2009	5.666.070	11.332.000	50

Sumber: Laporan Tahunan TELKOM, Data Diolah Kembali, 2010

Dari tahun 2001 ke tahun 2002 meskipun laba bersih meningkat hampir dua kali lipat namun *Dividend Payout Ratio* yang dikeluarkan oleh TELKOM mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut TELKOM melakukan investasi (*capital expenditure/CAPEX*) pengembangan prasarana telekomunikasi (pembangunan infrastruktur) senilai kurang lebih Rp 2,08 triliun pada tahun 2002, meningkat 10,9% dari tahun sebelumnya. Dan hal yang lain adalah karena meningkatnya kewajiban lancar sebesar 1,74% terutama karena bertambahnya hutang usaha, hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo, dan beban yang masih harus dibayar; serta meningkatnya kewajiban tidak lancar sebesar 31,97% terutama karena adanya hutang obligasi dan hutang pembelian penyertaan pada anak perusahaan.

Pada tahun 2003 rasio kewajiban terhadap ekuitas dan total aktiva menurun berturut-turut sebesar 16,41% dan 2,96% sehingga rasio pembayaran dividen dapat ditingkatkan. Namun laba bersih pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 24,3% dibandingkan laba bersih tahun 2002, maka jumlah dividen yang dibayarkan pun sedikit mengalami penurunan.

Dari tahun 2003 ke tahun 2004 laba bersih naik hanya sebesar 0,7% sementara beban usaha mencapai Rp 20,02 triliun dengan kenaikan hingga 32,2% terhadap beban usaha tahun 2003. Sepanjang tahun berjalan, pada bidang infrastruktur, perusahaan terus mengadakan pengembangan untuk memperbesar kapasitas dan meningkatkan kualitas *network* secara keseluruhan. Di bidang keuangan, untuk mengurangi risiko pertukaran *valuta asing* dan efisiensi dalam pembayaran bunga, TELKOM melakukan program pembayaran kembali hutang *two-step loans* kepada Pemerintah RI sebesar Rp 701,3 miliar, US\$ 48,8 juta dan

Euro 14,5 juta. Dengan kondisi seperti di atas maka rasio pembayaran dividen untuk tahun 2004 tidak mengalami peningkatan.

Di tengah kondisi makro ekonomi yang penuh tantangan pada tahun 2005, laba bersih TELKOM dibukukan meningkat 20,8% dibanding tahun 2004. Di tahun ini, TELKOM menguasai pangsa pasar untuk layanan telepon tetap kabel (sekitar 98%) dan layanan telepon tetap nirkabel (85%). Atas kinerja Perseroan yang menggembirakan tersebut maka rasio pembayaran dividen ditingkatkan. Selain itu juga karena di tahun 2005 terjadi pembelian kembali saham. Dengan pembelian kembali saham maka rasio pembayaran dividen akan lebih besar.

Di tahun 2006, laba bersih konsolidasian TELKOM tumbuh sebesar 38% dibanding tahun 2005. Peningkatan laba bersih tersebut diperoleh dari keseluruhan lima pilar bisnis utama (*core business*) perseroan yaitu telepon tidak bergerak (*fixed line*) yang terdiri dari telepon tidak bergerak kabel dan telepon tidak bergerak nirkabel, telepon selular, data & internet, jaringan (*network*) & interkoneksi. Dalam kurun waktu yang sama *margin* laba bersih perusahaan juga meningkat dari 19% pada tahun 2005 menjadi 21% pada akhir tahun 2006. Namun rasio lancar di tahun 2006 menurun 8,5% dibanding tahun 2005, sehingga rasio pembayaran dividen pun tetap.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 20,2% menjadi Rp 33.748,6 miliar pada tahun 2007. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bersih sebesar 16,8% atau Rp 1.851,4 miliar pada tahun 2007, yang diimbangi dengan peningkatan rasio pembayaran dividen sebesar 70%. Pencapaian laba bersih tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,85% pada tahun 2007. Tingkat Pengembalian Aktiva (*Return on Assets*) dan Rasio Lancar (*Current Ratio*) masing-masing mencapai 15,7% dan 77,3%, meningkat dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 14,6% dan 67,8%. Kondisi ini mengakibatkan rasio pembayaran dividen meningkat cukup tinggi hingga 15%.

Krisis keuangan global yang terjadi, pada tahun 2008 semakin memburuk. Kondisi ini telah membuat banyak operator telekomunikasi berada dalam tekanan. Semangat pemerintah untuk menurunkan tarif juga berdampak pada layanan sewa jaringan (*network*). Regulasi terkait ini pada dasarnya akan berdampak pada penurunan pendapatan sewa jaringan TELKOM. Dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, tingkat ancaman keamanan terhadap peralatan TELKOM pun meningkat, dengan lebih banyak kejadian pencurian dan vandalisme terhadap jaringan TELKOM, khususnya jaringan akses kabel. Akibatnya beban usaha meningkat sehingga menurunkan laba usaha sebesar Rp 4.165,2 miliar atau 15,7% dari Rp 26.472,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 22.307,5 miliar pada tahun 2008. Laba bersih perusahaan pada tahun ini juga terkena dampak negatif tersebut. Marjin laba bersih perusahaan menurun 17,4% atau

sebesar Rp 2.237,5 miliar. Maka sangat wajar jika rasio pembayaran dividen turun kembali menjadi 55% setelah tahun sebelumnya naik cukup tinggi 70%.

Pada tahun 2009, laba bersih TELKOM sebesar Rp 11.332 miliar meningkat 6,7% dibanding tahun 2008 atau 100,8% terhadap target tahun 2009. Sementara itu margin laba bersih sebesar 17,5% di tahun 2009 yang merupakan pencapaian 105,4% terhadap target margin laba bersih. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan seluler, jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya. Di samping kinerja yang positif, TELKOM juga menghadapi beberapa kendala selama tahun 2009 antara lain menurunnya pendapatan telepon kabel dan pendapatan interkoneksi, menurunnya *Average Revenue Per User* (ARPU) pada layanan seluler serta tidak tumbuhnya pendapatan bisnis telepon tidak bergerak nirkabel. Saldo laba ditahan meningkat sebesar Rp 4.967,2 miliar per 31 Desember 2009, yang diimbangi dengan penurunan rasio pembayaran dividen sebesar 5% menjadi 50%.

Menurut bentuk pembayaran dividen, kebijakan pembayaran dividen untuk tahun 2001, 2005, dan 2007 berdasarkan bentuk pembayaran dividen konstan karena besarnya dividen yang dibagi berdasarkan persentase tetap dari laba bersih sehingga persentase pertumbuhan dividen setiap tahun relatif sama.

Kebijakan pembayaran dividen untuk tahun 2003 dan 2006 sesuai dengan bentuk pembayaran dividen stabil karena besarnya dividen yang dibagi setiap tahun sama atau tetap per lembar sahamnya.

Kebijakan pembayaran dividen untuk tahun 2002 dan 2004 adalah bentuk pembayaran dividen residu karena dividen yang dibagi setiap tahun berdasarkan besarnya laba residual setelah kebutuhan investasi atau dana yang dibutuhkan telah terpenuhi.

Dan kebijakan pembayaran dividen untuk tahun 2008 dan 2009 menggunakan bentuk pembayaran dividen rendah plus ekstra di mana dividen yang dibagikan relatif rendah plus ekstra pada saat kondisi keuangan meningkat.

Harga Saham PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Periode 2001 – 2009

Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di bursa efek, di mana harga saham cenderung berfluktuasi. Valuasi atas nilai saham perusahaan yang diterapkan oleh TELKOM ditentukan antara lain oleh tingkat profitabilitas dan pengembalian modal selama beberapa tahun terakhir, serta premium yang dilekatkan oleh pasar pada nilai saham tersebut berdasarkan perkiraan prospek pertumbuhannya di masa depan.

Harga Saham TELKOM periode 2001 sampai dengan 2009 disajikan pada Tabel 4.2.2 di bawah. Harga saham disajikan dalam harga tertinggi

dan terendah untuk satu periode yang dibagi atas empat kuartal, kemudian harga saham tertinggi dan terendah masing-masing dihitung rata-ratanya untuk dihasilkan harga rata-rata saham dalam satu periode.

Harga Saham TELKOM Periode 2001 sampai dengan 2009

Tahun Kalender	Harga Rata-rata Saham Tertinggi	Harga Rata-rata Saham Terendah	Harga Rata-rata Saham
2001	3.181	2.281	2.731
2002	4.231	3000	3.616
2003	5.356	4.163	4.759
2004	4.450	3.606	4.028
2005	5.606	4544	5.075
2006	8.600	7.000	7.800
2007	11.313	9.538	10.425
2008	8.770	6.686	7.728
2009	8.950	7.275	8.113

Sumber: Laporan Tahunan TELKOM, Data Diolah Kembali, 2010

- * Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio 1:2 untuk Saham Biasa dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp250 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPST pada tanggal 30 Juli 2004, yang efektif pada tanggal 1 Oktober 2004. Nilai nominal hasil *stock split* telah diperhitungkan pada seluruh periode yang tertera.

Dari tahun 2001 ke tahun 2002 harga saham meningkat, faktor yang mempengaruhinya adalah meningkatnya *Net Income Margin* dari 24,99% di tahun 2001 menjadi 38,65% di tahun 2002.

Setelah reposisi usaha menjadi perusahaan *InfoCom* pada tahun 2002, secara keseluruhan, kinerja operasi TELKOM menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan di tahun 2003 pada kelima pilar bisnisnya. Kondisi ini menyebabkan saham TELKOM semakin banyak diminati investor maka harga saham terus naik.

Pada tahun 2004 dilakukan pemecahan nilai nominal saham biasa dari Rp 500 menjadi Rp 250 per saham (*stock-split* 1:2). Dengan pemecahan ini diharapkan saham TELKOM akan lebih aktif diperdagangkan karena semakin banyak investor yang berinvestasi atas saham tersebut, termasuk investor kecil. Terlihat di tahun ini harga saham menurun yang mencerminkan nilai nominal saham yang menurun akibat *stock split*, namun jumlah saham yang beredar bertambah.

Tanggal 21 Desember 2005, program pembelian kembali saham tahap pertama TELKOM telah disetujui RUPSLB. TELKOM merencana-

kan untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah keseluruhan saham seri B yang beredar, dalam waktu 18 bulan sejak tanggal persetujuan pemegang saham. Dengan pembelian kembali saham, nilai saham Perseroan meningkat sebesar 22,3% pada akhir tahun 2005, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan yang hanya sebesar 16,2%.

Harga saham TELKOM di Bursa Efek Jakarta (BEJ), sekarang Bursa Efek Indonesia (BEI), meningkat terus, dengan porsi kapitalisasi pasar terhadap jumlah kapitalisasi BEJ juga terus meningkat dari 13% di 2005 menjadi 16,3% di tahun 2006.

Perseroan melanjutkan program pembelian kembali saham tahap kedua yang dimulai pada tanggal 29 Juni 2007 dan berakhir pada bulan Juni 2008. Sektor telekomunikasi di Indonesia senantiasa menarik bagi para investor potensial, dan lebih penting lagi, investasi mereka dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dengan adanya kepastian masa depan industri sebagai jaminan keberlanjutan jangka panjang. Hasil-hasil positif yang telah dicapai di tahun 2007 mendorong naiknya harga saham, didukung oleh kinerja operasional bisnis telepon selular dan telepon tidak bergerak nirkabel. Total pelanggan selular dan tambahan pelanggan bersih (*net additional subscriber*) masing-masing mencapai 47,89 juta dan 12,29 juta, atau 11% dan 37% di atas target 2007. Untuk telepon tidak bergerak nirkabel "Flexi", total pelanggan dan tambahan pelanggan bersih masing-masing mencapai 6,4 juta dan 2,19 juta, atau 6% dan 14% di atas target tahun 2007.

Selama tahun 2008, TELKOM menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis keuangan global, yang antara lain dipicu masalah *sub-prime mortgage* di Amerika Serikat. Krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap TELKOM. Depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS dapat mengakibatkan dampak merugikan bagi TELKOM, antara lain kemungkinan timbulnya rugi selisih kurs nilai Dolar AS dari setiap jumlah yang akan diterima oleh pemilik resmi *American Depositary Share* (ADS) atau pemilik resmi pada penjualan saham biasa di Indonesia dalam hal pembagian dividen dan nilai Dolar AS pada obligasi TELKOM dan dapat dimungkinkan bahwa pertumbuhan secara umum juga akan melemah. Sementara itu, persaingan antara 12 operator *InfoCom* di Indonesia menjadi semakin meningkat dan ketat ditambah dengan regulasi baru yang membuat tarif interkoneksi anjlok hampir sebanyak 17% yang berdampak negatif terhadap rentabilitas Perseroan. Tarif koneksi di Indonesia berubah menjadi salah satu yang terendah di Asia dari yang sebelumnya tertinggi di tingkat dunia. Akibatnya pertumbuhan pelanggan dan pendapatan pelanggan layanan telepon tidak bergerak kabel mengalami penurunan masing-masing sebesar 1% dan 13%, yang menjadi tren di industri. Hal-hal tersebut di atas cukup membuat harga saham TELKOM sedikit terpuruk.

Di tengah kondisi persaingan yang ketat dan turun drastisnya tarif telekomunikasi pada beberapa tahun terakhir ini, selama periode 2009 TELKOM tetap dapat memperkokoh posisinya, meningkatkan profitabilitas dan menunjukkan pertumbuhan. Sebagai upaya untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar, TELKOM melakukan ekspansi portofolio bisnis dari semula hanya bisnis *voice*, kini mencakup bisnis informasi, media dan *edutainment* atau lebih dikenal dengan IME. Hal tersebut merupakan berita baik bukan saja bagi para investor dan karyawan, tapi juga bagi seluruh *stakeholder*, termasuk pemerintah dan masyarakat; yang memungkinkan harga saham TELKOM kembali terkoreksi naik.

KESIMPULAN

Kebijakan dividen yang diterapkan oleh TELKOM dari tahun ke tahun senantiasa diusahakan meningkat oleh manajemen. Nampak di beberapa tahun menurun disebabkan baik oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Periode 2002 rasio pembayaran dividen menurun karena TELKOM melakukan investasi yang bernilai cukup besar serta meningkatnya rasio hutang. Periode 2008 rasio pembayaran dividen menurun cukup besar akibat terjadinya resesi ekonomi global yang dampaknya sangat buruk terhadap semua sektor perekonomian di seluruh dunia.

Harga saham TELKOM senantiasa naik dari tahun ke tahun. TELKOM mampu untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan sehingga dapat menarik kepercayaan para investor. Periode 2004 harga saham TELKOM sedikit menurun karena adanya *stock split*. Periode 2008 harga saham TELKOM menurun cukup drastis karena dampak resesi ekonomi global namun di tahun-tahun selanjutnya kembali terkoreksi naik karena TELKOM mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Soritaon, S.E.,M.M

adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Langlangbuana Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhrudin. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2006.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi*, Edisi Kedua. Jakarta: PT Salemba Empat, 2005.
- Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005.
- Setia Atmaja, Lukas. *Manajemen Keuangan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Stice, Earl K., James D. Stice, dan Fred Skousen. *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi Kedua, Jilid 1. Jakarta: PT Salemba Empat, 2004.
- Sugiyarso, dan Winarni, *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN INTERNASIONAL

Oleh: Ari Bramasto

ABSTRAK

Artikel ini menggambarkan proses analisis laporan keuangan internasional, metode analisis apa saja yang digunakan, perbedaan laporan keuangan antar Negara, tahapan analisis-analisis yang digunakan oleh para analis dalam menganalisis laporan keuangan internasional dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menganalisis laporan keuangan internasional.

PENDAHULUAN

Investor, analisis riset ekuitas, manajer keuangan, banker dan para pengguna laporan keuangan lainnya memiliki kebutuhan yang semakin besar untuk membaca dan menganalisis laporan keuangan asing. Perbandingan keuangan lintas batas menjadi penting ketika melakukan analisis potensi dan kekuatan keuangan investasi asing langsung atau investasi portofolio asing. Terdapat pertumbuhan yang luar biasa dalam penerbitan dan perdagangan modal internasional pada tahun-tahun terakhir yang disebabkan oleh privatisasi, pertumbuhan ekonomi, pengenduran kontrol modal dan kemajuan dalam teknologi informasi yang terus menerus terjadi.

Kebutuhan untuk menggunakan, dan dengan demikian memahami, laporan keuangan asing juga meningkat karena kegiatan merger dan akuisisi telah semakin banyak terjadi secara internasional. Nilai merger lintas batas tumbuh secara terus menerus selama tahun 1990-an, dan pertumbuhan ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan.

Akhirnya, karena bisnis menjadi semakin global, laporan keuangan menjadi jauh lebih penting dari masa sebelumnya karena menjadi dasar untuk analisis persaingan, keputusan kredit, negosiasi usaha, dan kontrol perusahaan. Pengurangan hambatan perdagangan secara terus menerus, munculnya Eropa sebagai pasar tunggal, konvergensi selera dan preferensi konsumen, dan semakin rumitnya penetrasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap pasar luar negeri telah meningkatkan kompetisi bisnis multinasional secara signifikan. Semua ini menimbulkan kebutuhan lebih lanjut untuk analisis dan penilaian laporan keuangan internasional.

Analisis keuangan lintas batas mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Sebagai contoh, seorang analisis mungkin beberapa kali melakukan studi terhadap sebuah perusahaan yang berada di luar Negara asalnya atau membandingkan perusahaan yang berasal dari dua Negara atau lebih. Tantangan unik menghadang mereka yang melakukan analisis internasional.

Sejumlah negara memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik akuntansi, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup risiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Perbedaan ini berarti alat-alat analisis yang sangat efektif disatu wilayah menjadi kurang efektif diwilayah lain. Para analisis juga sering menghadapi tentangan besar untuk memperoleh informasi yang kredibel. Di kebanyakan negara pasar berkembang, para analisis keuangan sering memiliki tingkat keyakinan atau keandalan yang terbatas.

Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyak kontradiksi. Di satu sisi, begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengarah pada semakin meningkatnya daya banding informasi keuangan diseluruh dunia. Namun demikian, sejumlah besar perbedaan dalam praktik pelaporan keuangan masih ada. Beberapa analisis mempertanyakan sejauh mana keseragaman standar akuntansi yang lebih besar benar-benar akan menghasilkan penyediaan informasi yang dapat dibandingkan oleh sejumlah perusahaan terkemuka di suatu industri.

Perusahaan di seluruh dunia mengungkapkan informasi yang semakin banyak dan semakin kredibel. Banyak negara, termasuk Cina, Korea, Republik Ceko, dan Rusia, berupaya keras untuk memperbaiki ketersediaan dan kualitas informasi mengenai perusahaan publik. Demikian pula akses terhadap informasi yang tersedia bebas dan cukup relevan untuk analisis keuangan telah meningkat secara dramatis dengan penyebarluasan informasi perusahaan melalui internet. Namun demikian, di banyak negara pertentangan antara ekspetasi yang didasarkan pada kemajuan-kemajuan itu dengan realitas yang ada masih terus berlanjut. Para analisis keuangan seringkali merasa frustrasi dalam usaha mengumpulkan informasi, masih banyak perusahaan yang masih saja menerbitkan informasi yang sangat meragukan.

Terlepas dari kontradiksi yang masih terus berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan analisis secara umum masih positif. Globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi dan kompetisi antar pemerintah nasional, bursa efek dan perusahaan perusahaan untuk menarik investor, dan kegiatan perdagangan yang meningkat masih terus berlanjut. Secara bersama-sama, kekuatan-kekuatan ini memberikan

insentif bagi perusahaan untuk memperbaiki praktik pelaporan keuangan eksternal mereka.

Globalisasi dan perbaikan dalam akuntansi dan pengungkapan internasional yang masih berlanjut mengaburkan perbedaan antara analisis keuangan lintas batas dan dalam suatu wilayah. Melalui implementasi euro, bersamaan dengan kemajuan terus menerus dalam praktik pengungkapan perusahaan di Eropa, strategi diversifikasi portofolio di Eropa semakin didasarkan pada sektor industri dan bukan berdasarkan negara. Daripada menyeimbangkan pemilihan saham di antara negara-negara dengan mata uang kuat dan lemah, manajer portofolio semakin memusatkan perhatian untuk memilih perusahaan yang terbaik di suatu industri tanpa melihat negara asal. Globalisasi juga berarti analisis yang terlalu domestik menjadi semakin kurang relevan. Ketergantungan satu sama lain semakin meningkat dan tidak ada perusahaan dapat menghindar dari peristiwa yang terjadi di seluruh dunia.

PEMBAHASAN

Kerangka Dasar Analisis Usaha

Palepu, Bernard dan Healy membuat suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan data laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari empat tahap analisis, yaitu:

1. Analisis strategi usaha
2. Analisis akuntansi
3. Analisis keuangan (*analisis rasio dan analisis arus kas*)
4. Analisis prospektif (*peramalan dan penilaian*).

Derajat pentingnya masing-masing tahap bergantung pada tujuan analisis. Kerangka analisis usaha ini dapat diterapkan dalam banyak situasi keputusan, termasuk analisis surat berharga, analisis kredit dan analisis merger dan akuisisi.

Analisis Strategi Usaha

Analisis strategi usaha merupakan langkah penting pertama dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Hal ini memastikan bahwa analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan prospektif holistik. Dengan mengidentifikasi faktor pendorong laba dan risiko usaha yang utama, analisis strategi usaha untuk membantu para analis untuk membuat peramalan yang realistis. Prosedur standar untuk mengumpulkan informasi yang digunakan dalam

analisis strategi usaha meliputi pemeriksaan laporan tahunan dan penerbitan perusahaan lainnya dan berbicara dengan staf perusahaan, analisis dan profesional keuangan lainnya. Penggunaan sumber-sumber informasi tambahan seperti *World Wide Web* (internet), kelompok dagang, pesaing, konsumen, reporter, pelobi, regulator dan pers bisnis menjadi semakin umum. Akurasi keandalan dan relevansi masing-masing jenis informasi yang dikumpulkan juga perlu dievaluasi.

Analisis strategi usaha sering kali rumit dan sukar dilakukan dalam lingkungan internasional. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pendorong keuntungan yang utama dan jenis resiko usaha berbeda-beda di tiap negara. Memahami masing-masing dari itu semua sangatlah tidak mungkin dilakukan. Lingkungan bisnis dan hukum serta tujuan perusahaan juga berbeda-beda di seluruh dunia. Banyak risiko perlu evaluasi dan dilihat secara koheren. Di beberapa negara sumber-sumber informasi terbatas dan mungkin tidak akurat.

a. Ketersediaan Informasi

Analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Pemerintah di negara-negara maju kadang-kadang dianggap telah menerbitkan statistik ekonomi yang keliru atau menyesatkan. Situasi ini lebih buruk di beberapa negara berkembang. Sebagai contoh, salah satu alasan terjadinya krisis mata uang di Meksiko pada tahun 1994/1995 adalah kejutan bahwa pemerintah menyembunyikan informasi mengenai cadangan devisanya yang berkurang dan meledaknya jumlah uang yang beredar. Beberapa negara menunda penerbitan statistik apabila angka-angkanya tidak mengembirakan, atau terkadang memalsukan angka-angka ekonominya.

Memperoleh informasi mengenai industri juga sukar dilakukan di banyak negara dan jumlah serta kualitas informasi perusahaan sangat berbeda-beda. Ketersediaan informasi khusus mengenai perusahaan sangat-sangat rendah di banyak negara berkembang. Akhir-akhir ini banyak perusahaan besar yang melakukan pencatatan dan memperoleh modal di pasar luar negeri telah memperluas pengungkapan mereka dan secara sukarela beralih ke prinsip akuntansi yang diakui secara global seperti standar pelaporan keuangan internasional.

b. Rekomendasi untuk Melakukan Analisis

Keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional sukar dilakukan. Seringkali, perlu dilakukan perjalanan untuk mempelajari iklim bisnis setempat dan bagaimana industri dan perusahaan sesungguhnya beroperasi, khususnya di negara-negara pasar berkembang. *World Wide*

Web juga menawarkan akses yang cepat terhadap informasi yang hingga akhir-akhir ini masih belum tersedia atau sukar untuk diperoleh.

Informasi negara juga dapat ditemukan dalam penerbitan "siaran internasional" yang disebar oleh kantor akuntan besar, bank, dan broker. Federasi Internasional Bursa Efek (FIBV, <http://www.fibv.com>) dan Federasi Bursa Efek Eropa (FESE, <http://www.fese.be>) menerbitkan *newsletter* internasional yang sangat informatif dan majalah *Accountancy*, *The Economist*, *Financial Analysts Journal* dan *Euromoney* menyediakan banyak artikel yang sangat relevan untuk melakukan analisis keuangan internasional.

Risiko yang sangat besar dapat terjadi karena analisis strategi usaha yang tidak memadai. Sebagai contoh lihat kasus Parmalat baru-baru ini, yang menunjukkan kecurangan (*fraud*) terbesar dalam sejarah keuangan Eropa. Dalam kasus ini, aktiva milik group perusahaan susu yang berkembang paling cepat di Eropa ini hilang menguap setidaknya sebesar \$13 miliar, dan hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi investor dan kreditor perusahaan. Beberapa pengamat menyebutkan bencana keuangan ini terjadi karena beberapa penyebab. Investor asing dilaporkan telah melakukan investasi di sebuah perusahaan yang tidak menyediakan pengungkapan yang lengkap dan kredibel. Mereka tidak mengetahui banyak mengenai lingkungan usaha di mana mereka melakukan investasi dan mereka berperan serta dalam suatu pasar yang aturan pelaporan keuangannya tidak ditegakkan dengan ketat.

Analisis Akuntansi

Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauhmana hasil yang dilaporkan perusahaan yang mencerminkan realitas ekonomi. Para analis perlu untuk mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi, serta menganalisis sifat dan ruang lingkup **fleksibilitas** akuntansi suatu perusahaan. Yang terakhir ini mengacu pada diskresi manajemen dalam menentukan kebijakan dan estimasi akuntansi yang harus ditetapkan dalam suatu peristiwa akuntansi tertentu. Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diandalkan, analis harus menyesuaikan jumlah akuntansi yang dilaporkan untuk menghilangkan distorsi yang disebabkan oleh penggunaan metode akuntansi yang menurut analis itu tidak layak. Sebagai contoh, analis mungkin menyakini bahwa revaluasi atas aktiva tetap suatu menghasilkan nilai tercatat aktiva terlalu tinggi.

Para manajer perusahaan diperbolehkan untuk membuat banyak pertimbangan yang terkait dengan akuntansi, karena merekalah yang tahu paling banyak mengenai kondisi operasi dan keuangan perusahaan mereka. Fleksibilitas dalam pelaporan keuangan merupakan hal penting karena memungkinkan manajer untuk menggunakan pengukuran akuntansi yang paling mencerminkan situasi dan keadaan operasi tertentu

dari perusahaan. Namun demikian, manajer memiliki insentif untuk mendistorsikan kenyataan operasi dengan menggunakan diskresi akuntansi yang dimiliki untuk mendistorsikan laba yang dilaporkan. Satu alasannya adalah bahwa laba yang dilaporkan seringkali digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja manajemen mereka.

Healy dan rekannya menyarankan proses berikut dalam melakukan evaluasi kualitas akuntansi suatu perusahaan:

1. Identifikasikanlah kebijakan akuntansi utama
2. Analisislah fleksibilitas akuntansi
3. Evaluasilah strategi akuntansi
4. Evaluasilah kualitas pengungkapan
5. Identifikasikanlah potensi terjadinya masalah (seperti penghapusan aktiva dalam jumlah besar yang tidak biasanya, transaksi yang meningkat laba yang tidak dapat dijelaskan atau meningkatnya perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan dengan arus kas dari operasi)
6. Buatlah penyesuaian atas distorsi akuntansi.

Untuk menggambarkan proses ini, pertimbangan kualitas akuntansi WorldCom, sebuah perusahaan AS yang besar, yang kebijakannya menimbulkan skandal *Wall Street* yang besar. Pada saat secara resmi menuduh perusahaan atas kesalahannya dalam praktik akuntansi. Dalam kasus ini, WorldCom memilih mengkapitalisasikan apa yang sesungguhnya merupakan beban operasi. Praktik ini jelas merupakan pelanggaran terhadap GAAP AS, sedangkan manajemen memilih untuk menyembunyikan informasi ini dari investor dengan menutupi beban operasi sebagai pengeluaran modal. Pengaruh terhadap laporan keuangan atas kapitalisasi versus pembebanan pengeluaran utamanya ini berakibat sangat signifikan terhadap laba yang dilaporkan, karena jumlahnya hampir mendekati \$2 miliar.

Dua isu utama menjadi tantangan bagi mereka yang melakukan analisis akuntansi dalam lingkungan internasional. Yang pertama adalah perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran, kualitas pengungkapan dan kualitas audit, sedangkan yang kedua menyangkut kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis akuntansi.

Pelaporan keuangan di Cina menunjukkan contoh kedua mengenai bagaimana pengukuran akuntansi, pengungkapan dan kualitas audit dapat berbeda secara dramatis bila dibandingkan dengan praktik akuntansi di negara-negara Anglo-Amerika. Meskipun Cina melaksanakan reformasi akuntansi besar-besaran sebagai bagian dari proses transisi dari perekonomian terencana menjadi perekonomian pasar terkendali, hingga beberapa saat yang lalu Cina masih belum memiliki pelaporan keuangan dan audit eksternal dalam bentuk yang lazim bagi

orang barat. Investor dan kreditor swasta tidak hadir secara nyata selama tiga dekade setelah pembentukan Republik Rakyat Cina pada tahun 1948, dan Undang-Undang Akuntansi yang menetapkan ketentuan akuntansi dan pelaporan baru diterapkan pada tahun 1985. Standar Akuntansi untuk perusahaan bisnis, yang menentukan bahwa praktik akuntansi dasar seperti pencatatan buku ganda dan dasar aktual harus digunakan, berlaku efektif pada tahun 1993. Profesi audit juga sangat baru di Cina.

- **Saran-saran untuk Para Analis**

Teristimewa pada saat melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan di negara pasar berkembang, para analis harus sesering mungkin bertemu dengan manajemen untuk mengevaluasi insentif pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi mereka. Banyak perusahaan di negara pasar berkembang yang sangat tertutup dan para manajer mungkin tidak memiliki insentif yang kuat untuk melakukan pengungkapan yang lengkap dan kredibel. Kebijakan akuntansi di beberapa negara dapat mirip atau sama persis dengan IAS (atau standar lain yang diterima luas), tetapi manajer seringkali memiliki diskresi yang sangat besar dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan.

Sebagai contoh, seorang manajer portofolio menggambarkan analisisnya terhadap Siam Cement, sebuah perusahaan terbesar dalam industry semen di Thailand dan sebuah perusahaan pesaingannya yang baru didirikan. Siam Cement mendepresikan bagian-bagian dari pabrik semennya selama 5 tahun. Strategi yang agresif ini dirancang untuk meminimalkan pembayaran pajak karena di Thailand catatan keuangan harus sesuai dengan catatan pajak. Sebaliknya, pihak kompetitor menggunakan periode depresiasi selama 20 tahun untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan (yang berarti harus membayar pajak lebih banyak daripada yang diperlukan).

Akhirnya, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, teknologi komunikasi baru (termasuk *World Wide Web*) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh tahap riset keuangan. Banyak perusahaan dan negara yang sekarang telah memiliki situs Web yang membuat setiap orang yang tertarik menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi.

Analisis Keuangan Internasional

Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. **Analisis rasio dan analisis arus kas** merupakan alat yang penting dalam melakukan analisis keuangan.

Analisis rasio mencakup perbandingan rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industry yang sama, perbandingan rasio suatu perusahaan antar waktu atau dengan periode fiskal yang lain dan atau perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang baku. Analisis ini memberikan masukan terhadap derajat perbandingan dan relatif pentingnya pos-pos laporan keuangan dan dapat membantu dalam meng- evaluasi efektivitas kebijakan operasi, investasi, pendanaan dan retensi laba yang diambil manajemen. Ringkasan dari rasio keuangan yang biasanya digunakan dapat dilihat di Tabel 1.

Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas, yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, serta pengungkapan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas secara periodik. Para analis dapat menggunakan analisis arus kas untuk menjawab banyak pertanyaan mengenai kinerja dan manajemen perusahaan. Sebagai contoh, apakah perusahaan telah menghasilkan arus kas yang positif dari operasinya? Bagaimana perubahan komponen arus kas dalam beberapa waktu ini terkait dengan perubahan dalam komponen laporan laba rugi, khususnya penjualan dan harga pokok penjualan? Apakah pengaruh terhadap arus kas yang ditimbulkan dari keputusan manajemen dalam kebijakan keuangan, kebijakan deviden dan investasi?

1. Analisis Rasio

Terdapat dua masalah yang harus dibahas ketika melakukan analisis rasio dalam lingkungan internasional. Yang *pertama*, apakah perbedaan lintas negara dalam prinsip akuntansi menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam angka-angka laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan dari negara yang berbeda? *Kedua*, seberapa jauh perbedaan dalam budaya serta kondisi persaingan dan ekonomi lokal mempengaruhi interpretasi ukuran akuntansi dan rasio keuangan, meskipun pengukuran akuntansi dari negara yang berbeda disajikan ulang agar tercapai "daya banding akuntansi"?

Sejumlah bukti yang kuat menunjukkan adanya perbedaan besar antarnegara dalam profitabilitas, pengungkit dan rasio serta jumlah laporan keuangan lainnya yang berasal dari faktor akuntansi dan non-akuntansi. (Bagian berikutnya membahas perbedaan lintas negara dalam dua rasio **penilaian**, rasio harga terhadap laba dan rasio harga terhadap buku). Sebagai contoh, Frost membandingkan pendapatan penjualan, laba bersih dan pengungkit (total utang/ekuitas pemegang saham) dari 400 perusahaan, dengan 80 perusahaan berada di masing-masing negara yaitu di Prancis, Jerman, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Contoh 80 perusahaan di lima negara tersebut ditandingkan menurut

ukuran (nilai pasar ekuitas), di mana seluruh perusahaan itu tergolong kelompok industri manufaktur (Kode SIC 20 hingga 39).

Tabel 1. Ringkasan Rasio Keuangan

Rasio	Rumus Perhitungan
I. Likuiditas	
1. Rasio lancar	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$
2. Rasio cepat atau <i>acid test</i>	$\frac{\text{Kas, surat berharga yg dpt diperjualbelikan}}{\text{Kewajiban lancar}}$
3. Rasio kas kini	$\frac{\text{Kas bersih yg berasal dari kegiatan operasi}}{\text{Rata-rata kewajiban lancar.}}$
II. Efisiensi	
4. <i>Perputaran piutang</i>	$\frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Rata-rata piutang dagang (bersih)}}$
5. <i>Perputaran persediaan</i>	$\frac{\text{Harga pokok penjualan}}{\text{Rata-rata persediaan}}$
6. <i>Perputaran aktiva</i>	$\frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Rata-rata jumlah aktiva.}}$
III. Profitabilitas	
7. <i>Margin laba atas penjualan</i>	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$
8. <i>Tingkat imbalan atas aktiva</i>	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rata-rata jumlah aktiva}}$
9. <i>Tingkat imbalan atas ekuitas saham biasa</i>	$\frac{\text{Laba bersih dikurangi dividen saham preferen}}{\text{Rata-rata ekuitas pemilik saham biasa}}$
10. <i>Laba per saham</i>	$\frac{\text{Laba bersih dikurangi dividen saham preferen}}{\text{Rata-rata tertimbang saham beredar}}$
11. <i>Rasio pembayaran</i>	$\frac{\text{Dividen tunai}}{\text{Laba bersih.}}$
IV. Coverge	
12. <i>Rasio utang terhadap total aktiva</i>	$\frac{\text{Utang}}{\text{Jumlah aktiva atau ekuitas}}$
13. <i>Times interest earned</i>	$\frac{\text{Laba sebelum beban bunga dan pajak}}{\text{Beban bunga}}$
14. <i>Cash debt coverge ratio</i>	$\frac{\text{Arus kas}}{\text{Rata-rata jumlah kewajiban}}$
15. <i>Nilai buku per saham</i>	$\frac{\text{Ekuitas pemegang saham biasa}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$

Ketiga ukuran keuangan seluruhnya sangat berbeda secara substansial di antara negara-negara contoh. Misalnya, nilai median laba

bersih lebih besar di Inggris dan di Amerika Serikat, ketimbang di Jerman dan Jepang. Keragaman dalam laba bersih sebagian dijelaskan oleh perbedaan prinsip akuntansi karena pelaporan keuangan umumnya tidak terlalu konservatif di Inggris dan di Amerika Serikat, bila dibandingkan dengan di Jerman dan Jepang. Faktor-faktor non akuntansi juga mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan. Sebagai contoh, fokus terhadap kreditor di Prancis, Jerman dan Jepang menyebabkan laba bersih yang lebih rendah ketimbang Amerika Serikat dan Inggris karena di negara-negara tersebut manajer tidak terlalu menghadapi tekanan untuk melaporkan laba bersih yang meningkat dengan stabil.

Frost juga menemukan bahwa nilai median pengungkit di Inggris dan di Amerika Serikat lebih rendah dari pada di Jerman dan Jepang. Hal ini terjadi sebagian karena kenyataan bahwa akuntansi yang konservatif di Jerman dan Jepang mengakibatkan nilai ekuitas pemegang saham yang dilaporkan lebih rendah dari pada Inggris dan Amerika Serikat. Nilai pengungkit yang lebih tinggi di Jerman dan Prancis juga disebabkan karena lebih tingginya jumlah utang dalam struktur utang dalam struktur modal yang mencerminkan ketergantungan besar terhadap pendanaan dari bank di negara-negara tersebut.

2. Analisis Arus Kas

Sebagaimana dibahas sebelumnya, analisis arus kas memberikan masukan mengenai arus kas dan manajemen perusahaan. Laporan arus kas yang sangat mendetail diwajibkan menurut GAAP AS, GAAP Inggris, IFRS dan standar akuntansi di sejumlah negara yang jumlahnya makin bertambah. Ukuran-ukuran yang berkaitan dengan arus kas sangat bermanfaat khususnya dalam analisis internasional karena tidak terlalu dipengaruhi oleh prinsip akuntansi, bila di bandingkan dengan ukuran-ukuran berbasis laba. Apabila laporan arus kas tidak disajikan, sering kali di temukan kesulitan untuk menghitung arus kas dari operasi dan ukuran arus kas lainnya dengan menyesuaikan laba berbasis akrual. Banyak perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk membuat penyesuaian tersebut. Satu contoh adalah neraca di Jerman seringkali memuat akun-akun cadangan yang jumlahnya luar biasa besar yang mencerminkan berbagai jenis akrual yang berbeda. Hanya sedikit detail yang disajikan agar dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk menganalisis implikasinya terhadap arus kas koperasi, investasi dan pendanaan.

3. Mekanisme untuk Mengatasinya

Bagaimana para pengguna laporan keuangan dapat mengatasi perbedaan prinsip akuntansi lintas negara? beberapa pendekatan dapat digunakan. Beberapa analisis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing

menurut sekelompok prinsip yang diakui secara internasional atau sesuai dengan dasar lain yang lebih umum. Beberapa yang lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di negara-negara tersebut.

Brown, Soybel dan Stickney menggambarkan penggunaan algoritma penyajian ulang untuk meningkatkan perbandingan kinerja keuangan lintas negara. Mereka menyajikan ulang kinerja operasi perusahaan perusahaan AS dan Jepang menurut dasar pelaporan yang sama. Dan bukannya mengubah data AS ke dalam pelaporan keuangan Jepang atau sebaliknya data Jepang kedalam pelaporan AS, mereka menyesuaikan baik data AS dan Jepang untuk mencapai prinsip akuntansi yang sama. Algoritma penyajian ulang yang relatif sederhana cukup efektif untuk digunakan. Salah satu pendekatan adalah memfokuskan pada beberapa perbedaan laporan keuangan yang paling material, dimana tersedia cukup informasi untuk melakukan penyesuaian yang dapat diandalkan.

Analisis Prospektif Internasional

Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analisis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi dan analisis keuangan. Ramalan ini menjawab berbagai pertanyaan seperti, Bagaimana perubahan strategi usaha sebuah perusahaan dapat mempengaruhi volume dan laba penjualannya di masa depan? Apakah perusahaan baru-baru ini menerapkan kebijakan akuntansi baru yang membuat laba kini terlihat membaik dengan konsekuensi laba tahun depan menjadi lebih rendah? Apakah hubungan keuangan yang terlihat dalam analisis rasio yang dilakukan analisis akan terus berlanjut ?

Ketika melakukan penilaian, analisis mengubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak keputusan usaha. Sebagai contoh, penilaian merupakan dasar rekomendasi investasi yang diberikan analisis ekuitas. Ketika menganalisis kemungkinan merger, calon pembeli akan mengestimasi nilai perusahaan yang menjadi target. Terdapat banyak pendekatan penilaian yang berbeda digunakan dalam praktik, mulai dari analisis arus kas terdiskonto hingga teknik yang lebih sederhana yang berdasarkan perkalian berdasarkan harga.

Para pakar dalam penilaian internasional memberikan peringatan sebagai berikut ini kepada mereka yang melakukan analisis prospektif internasional: "Setiap aturan yang telah Anda pelajari di negara asal Anda menjadi tidak berlaku di luar negeri." Fluktuasi kurs, perbedaan akuntansi, perbedaan praktik dan kebiasaan bisnis, perbedaan pasar

modal dan banyak faktor lainnya yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peramalan dan penilaian internasional.

Akhirnya, akurasi ramalan laba oleh analis berkaiatan positif dengan kuatnya penegakan aturan standar di suatu negara. Hope menyebutkan keterkaitan ini dengan istilah bahwa penegakan aturana akan mempersempit perbedaan pilihan akuntansi yang diizinkan. Pada gilirannya hal ini akan mengurangi ketidakpastian analis terhadap besarnya diskresi pelaporan suatu perusahaan.

Faktor yang Mempengaruhi Tahap Analisis

Keempat tahap analisis usaha (analisis usaha, akuntansi, keuangan dan prospektif) dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu:

- 1) Akses informasi
- 2) Ketepatan waktu informasi
- 3) Hambatan bahasa dan terminologi
- 4) Masalah mata uang asing
- 5) Perbedaan dalam jenis dan format keuangan

Berikut penjelasannya mengenai faktor-faktor tahap analisis usaha.

1. Akses Informasi

Informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Sumber informasi dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya muncul melalui World Wide Web. Perusahaan di seluruh dunia saat ini memiliki situs Web dan laporan tahunnya tersedia secara cuma-cuma dari berbagai sumber internet dan lainnya.

Banyak perusahaan juga menjawab permintaan atas laporan tahunan dan dokumen keuangan lainnya yang disampaikan secara tertulis melalui telepon. Dalam sebuah studi, lebih dari 70% dari suatu sampel 160 perusahaan publik besar yang dihubungi di Prancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat memberikan jawaban atas permintaan laporan tahunan secara tertulis. Namun demikian, hanya 15 (sekitar 37,5%) dari 40 perusahaan besar di Jepang yang dihubungi memberikan jawaban. Dengan demikian, jumlah ketersediaan informasi perusahaan sangat berbeda dari satu negara ke negara lain.

2. Ketepatan Waktu Informasi

Ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers yang menyangkut laporan akuntansi berbeda-beda di tiap negara. Pelaporan keuangan tiap kuartal merupakan praktek yang lazim dilakukan di Amerika Serikat, sedangkan di tempat lain masih jarang dilakukan. Jangka waktu pelaporan keuangan

juga dapat diestimasi dengan membandingkan akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan auditnya. Tanggal terakhir ini dianggap sebagai tanggal indikasi kapan informasi keuangan perusahaan pertama kali tersedia untuk masyarakat umum.

Di Brazil, Kanada, Chili, Kolombia, Meksiko, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat jangka waktu pelaporan ini dilaporkan berkisar antara 30-60 hari. Perbedaan dalam ketepatan waktu informasi akuntansi menambah beban para pembaca laporan keuangan perusahaan asing. Beban ini semakin besar untuk perusahaan yang memiliki lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Agar penilaian yang dilakukan dapat bermakna, diperlukan penyesuaian terus menerus atas jumlah yang dilaporkan dengan menggunakan alat yang konvensional atau pun tidak konvensional.

3. Hambatan Bahasa dan Terminologi

Perbedaan bahasa antarnegara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunannya dalam bahasa negara asal. Namun demikian, semakin banyak perusahaan yang relatif besar yang berada di perekonomian maju menyediakan laporan tahunan dalam bahasa Inggris.

Perbedaan terminologi akuntansi juga dapat menimbulkan kesulitan. Sebagai contoh, para pembaca di AS mengartikan istilah *stock* sebagai surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan (saham). Di sisi lain, para pembaca di Inggris mengartikan istilah itu sebagai persediaan barang yang belum terjual milik perusahaan. Contoh lain perbedaan terminologi antara Inggris dan Amerika Serikat antara lain *turnover* (pendapatan penjualan) dan *debtors (account receivable)* dan *creditor (account payable)*.

4. Pertimbangan Mata Uang Asing

Akun-akun yang mendominasi dalam mata uang asing membuat para analis menghadapi dua jenis permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan kemudahan pembaca, yang kedua menyangkut isi informasi.

Sebagian perusahaan di seluruh dunia menetapkan dominasi akun-akun keuangannya dengan mata uang domisili nasional mereka. Bagi seorang pembaca dari AS yang terbiasa dengan dolar, analisis akun-akun yang dinyatakan dalam euro dapat menimbulkan kebingungan. Jawaban yang umum untuk mengatasinya adalah dengan mentranslasikan saldo-saldo dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik. Namun demikian, sebagian besar laporan mata uang asing hanya

menyulitkan dalam tampilannya saja. Rasio keuangan yang mengubah unit pengukuran nominal (interval) ke dalam hubungan persentase tidak berkaitan dengan mata uang. Rasio lancar yang dihitung dari neraca sebuah perusahaan Belanda yang dinyatakan dalam euro akan sama saja dengan yang dihitung dari laporan keuangan yang sama itu setelah ditranslasikan ke dalam dolar.

Para pembaca yang menyukai kerangka dasar mata uang domestik pada saat menganalisis akun-akun dalam mata uang asing dapat menerapkan **translasi untuk tujuan kemudahan** dengan menggunakan kurs pada akhir tahun. Namun demikian seseorang harus berhati-hati jika melakukan analisis tren data yang telah ditranslasikan. Penggunaan kurs kemudahan untuk mentranslasikan akun-akun dalam mata uang asing dapat mendistorsikan pola keuangan yang terjadi dalam mata uang lokal.

5. Perbedaan dalam Format Laporan

Format neraca dan laporan laba rugi berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, berbeda dengan Amerika Serikat di mana kebanyakan perusahaan menggunakan format neraca dengan aktiva di sisi kiri dan klaim atas ekuitas di sisi kanan, format sebaliknya digunakan di Inggris. Contih kedua, berbeda dengan neraca di AS yang menyajikan aktiva semakin menurun dalam urutan likuiditas dan kewajiban semakin meningkat dalam urutan tanggal jatuh tempo, di banyak negara aktiva yang paling likuid dan kewajiban dengan jangka waktu paling pendek ditempatkan di bagian bawah neraca.

Perbedaan klasifikasi secara internasional juga cukup banyak terjadi. Sebagai contoh, akumulasi depresiasi disajikan sebagai akun kontra aktiva di Amerika Serikat. Di Jerman, aktiva yang didepresiasi umumnya disajikan bersih dari akumulasi depresiasi, tetapi seluruh perubahan akun aktiva jangka panjang yang terjadi dalam suatu periode berjalan langsung disajikan di neraca. Di banyak negara perbedaan antar kewajiban lancar dan tidak lancar adalah satu tahun. Di Jerman, perbedaan sering kali adalah 4 tahun.

Meski menyulitkan, perbedaan format laporan keuangan tidak terlalu penting karena struktur dasar laporan keuangan cukup mirip di seluruh dunia. dengan demikian, kebanyakan perbedaan biasanya dapat direkonsiliasikan dengan sedikit usaha. Buku acuan seperti *Transaction Accounting* dapat digunakan untuk melihat secara lengkap perlakuan perbedaan klasifikasi lainnya yang ada di tiap-tiap negara. Meski menyulitkan, perbedaan format laporan keuangan tidak terlalu penting karena struktur dasar laporan keuangan cukup mirip di seluruh dunia. Dengan demikian, kebanyakan perbedaan biasanya dapat direkonsiliasikan dengan sedikit usaha.

Secara singkat, banyak isu-isu substansial yang dihadapi para pengguna laporan keuangan internasional. Mungkin isu yang paling sulit adalah

yang berkaitan dengan mata uang asing dan ketersediaan dan kredibilitas informasi keuangan. Kesulitan dengan mata uang asing mungkin akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar dalam akuntansi internasional selama beberapa waktu. Sebaliknya, masalah yang berkaitan dengan ketersediaan dan kredibilitas informasi secara perlahan semakin berkurang karena semakin banyak perusahaan otoritas berwenang dan bursa efek yang mengakui pentingnya untuk memperbaiki akses investor terhadap informasi yang tepat waktu dan kredibel.

KESIMPULAN

Kebutuhan untuk menggunakan dan memahami laporan keuangan asing juga meningkat karena kegiatan merger dan akuisisi telah semakin banyak terjadi secara internasional. Analisis laporan keuangan internasional terdiri dari empat tahap analisis yaitu (1) analisis strategi usaha, (2) analisis akuntansi, (3) analisis keuangan (analisis rasio dan arus kas), dan (4) analisis prospektif (peramalan dan penilaian).

Analisis strategi usaha merupakan langkah penting pertama dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan *World Wide Web* yang harus disediakan oleh setiap negara agar dapat diakses dengan mudah. Analisis akuntansi bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analis perlu untuk mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi.

Analisis keuangan internasional bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat penting dalam melakukan analisis keuangan. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Para analis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi dan analisis keuangan, sedangkan penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak keputusan usaha. Keempat tahap analisis usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain akses informasi, ketetapan waktu informasi, hambatan bahasa dan terminologi, masalah mata uang asing, dan perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan.

Ari Bramasto, SE.,Ak.,MSi.
adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Langlangbuana Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- D.S. Choi, Frederick & Gary K. Meek. 2005. *Akuntansi Internasional*.
Buku 2 Edisi 5. New York University, Oklahoma State University.
Jakarta: Salemba Empat
- Eko Suwardi. 2000. *Akuntansi Internasional*. Yogyakarta: BPFE

BANK SYARIAH ADALAH BANK BAGI HASIL ?

Oleh: Sri Dewi Anggadini

ABSTRAK

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, Laporan Keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Persamaan dan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang tidak begitu kompleks membuat munculnya beragam persepsi masyarakat. Untuk membedakan antara bank konvensional dan bank syariah secara umum adalah pada sistem dan prinsipnya yaitu bagi hasil atau *profit sharing*. Dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan bank Islam atau bank syariah sebagai paradigma tersebut menjadi lekat sebagai bank bagi hasil atau *profit sharing banking*.

PENDAHULUAN

Sejak awal kelahiran bank Syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di tanah air kita yaitu dengan adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara non konvensional. Dalam sekejap mata perbankan Islam di tanah air kita tumbuh dengan sangat pesat. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dimplementasikan oleh bank syariah. undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Untuk membedakan antara bank konvensional dan bank syariah secara umum adalah pada

sistem dan prinsipnya yaitu bagi hasil atau profit sharing. Dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan bank Islam atau bank syariah sebagai paradigma tersebut menjadi lekat sebagai bank bagi hasil atau profit sharing banking.

Prinsip bagi hasil atau profit sharing merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Sesungguhnya demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

KERANGKA TEORITIS

Al Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

Adapun pengertian Al-musyarakah yang dikemukakan oleh Bidayatul Mujtahid II dan disadur oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" adalah: "Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

Jadi pengertian al-musyarakah menurut pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa al-musyarakah adalah kerja sama untuk menjalankan suatu usaha antara dua atau lebih pihak yang terkait yang mana memberikan kontribusi usaha dengan kapasitas dan nilai yang sama dengan penanggungungan resiko dibagi sama rata.

Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Menjelaskan: "... maka mereka berserikat pada sepertiga..." (an-Nisaa':12) "Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan aural saleh." (Shaad: 24). Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa': 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena warts, sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyan).

b. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jolla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim). Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

Al- Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

Secara umum al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Pengertian al-mudharabah yang dikemukakan oleh Muhammad Rawas Qal'aji yang disadur oleh Muhammad Syafi'l Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" adalah: "Akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola yang mana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola serta seandainya kerugian diakibatkan karna kecurangan dan kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut".

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

Menyatakan bahwa : "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...." (al-Muaammil: 20)

Yang menjadi wajah-dilalah -j) atau argumen dari surah alMuzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah is mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah ber-konsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan Para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid".

Al Muzaraah (Harvest Yield Profit Sharing)

Pengertian Al-muzara'ah yang diungkapkan dalam Fiqh Sunnah III yang disadur oleh Muhammad Syafi' Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" adalah: "Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen."

Al-muzara'ah sering kali diidentikkan dengan mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. Muzara'ah merupakan benih dari pemilik lahan dan mukhabarah merupakan benih dari penggarap.

Al MUSAQAH (Plantation management Fee Based On Certain Portion Of Yield)

Pengertian Al-musaqah yang diungkapkan oleh Ahmad asy-Syarbasyi yang disadur oleh Muhammad Syafi' Antonio dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" adalah: "Bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen."

PEMBAHASAN

Bank Syariah Adalah Bank Bagi Hasil ?

Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts*. Padahal kita telah mengetahui bahwa selain *natural uncertainty contracts* ini, fiqh islam juga mengenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli, sistem titipan atau simpanan, sistem jasa dan sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah.

Penjelasan di atas perlu ditegaskan untuk meluruskan pemahaman dan persepsi masyarakat, bahwa bank syariah hanya terbatas pada sistem bagi hasil. Sebenarnya tidak demikian. Bank syariah mempunyai ruang gerak yang lebih luas lagi daripada sistem bagi hasil. Bank syariah juga menerapkan sistem jual-beli dan sewa-menyewa, di samping sistem bagi hasil. Dengan banyaknya alternatif yang terbuka seperti ini, maka diharapkan penerapan praktik bank syariah dapat menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan keadaan spesifik yang dihadapi di lapangan. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu

maudharabah saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad.

Pada produk bagi hasil (*profit sharing*) keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil disepakati di muka. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah, dan Al-musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah Al-Musyarakah dan Al-Murabahah, sedangkan Al-Muzara'ah dan Al-Musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Persepsi Masyarakat Bahwa Profit Sharing Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah

Persepsi yang tertanam selama ini dalam benak masyarakat luas di Indonesia bahwa prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Kalimat di atas perlu ditegaskan kembali untuk meluruskan persepsi masyarakat luas dengan pemahaman dan persepsi yang benar, bahwa bank syariah hanya terbatas pada sistem bagi hasil. Sebenarnya tidak demikian. Bank syariah mempunyai ruang gerak yang lebih luas lagi daripada sistem bagi hasil. Bank syariah juga menerapkan sistem jual-beli dan sewa-menyewa, di samping sistem bagi hasil.

Hal yang membuat masyarakat luas menganggap, bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil dikarenakan perkembangan paradigma bank syariah tentang bagi hasil adalah untuk membedakan sistem kerja bank syariah dengan bank konvensional lainnya di tanah air. Hal yang turut serta dalam membangun persepsi bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil yaitu nisbah keuntungan. Baik itu berupa titipan simpanan maupun pembiayaan, sistem yang berlaku di bank syariah adalah nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan dapat dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Nisbah keuntungan dalam bentuk bagi untung dan bagi rugi. Serta dalam bentuk jaminan dan menentukan besarnya nisbah.

P E N U T U P

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penyusun menyimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

1. Paradigma bank syariah sebagai bank bagi hasil selama ini merupakan persepsi masyarakat yang melekat dikarenakan kekurangpahaman mengenai sistem dan prinsip yang ada pada bank syariah. Karena pada dasarnya, bank syariah tidak hanya terbatas pada sistem bagi hasil. Bank Syariah mempunyai ruang gerak yang lebih luas lagi daripada sistem bagi hasil. Bank Syariah juga menerapkan sistem jual-beli dan sewa-menyewa, di samping sistem bagi hasil.
2. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan muzara'ah, dan pembiayaan musaqah.
3. Penerapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan tiga metode, yaitu penentuan nisbah bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*), penentuan nisbah bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*), penentuan nisbah bagi hasil penjualan (*sales sharing*).

Sri Dewi Anggadini, SE.,MSi.

adalah Dosen Universitas Komputer Indonesia Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarmana. Karim, 2007, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, 2005, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Wiroso, Modul Pelatihan Perbankan Syariah 22-23 Mei 2007 "*Akuntansi Pembiayaan Mudharabah*", Universitas Padjadjaran.

Pedoman Penulisan Jurnal Ekonomus Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana

- Sistematika penulisan mengikuti gaya Jurnal Ekonomi & Manajemen Usaha Fakultas Ekonomi.
- Panjang tulisan 7-15 halaman, spasi rangkap berukuran quarto.
- Judul harus mencerminkan isi tulisan.
- Judul tidak berkepanjangan, jelas dan ringkas.
- Sedapat mungkin mencantumkan intisari (abstrak)
 - Panjang abstrak minimal 300 kata.
 - Abstrak berisi latar belakang penulisan, kerangka pikir dan perumusan masalah.
- Latar belakang penulisan harus menguraikan bagaimana masalah itu muncul dan memberikan alasan perlunya atau pentingnya masalah itu dikaji/dianalisis. Perlu sajian pengamatan secara teoritis atau empiris untuk menunjukkan bahwa fenomena masalahnya memang ada.
- Perumusan masalah harus dapat menunjukkan inti masalah yang hendak dikaji dan menunjukkan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi.
- Perlu mencantumkan tinjauan pustaka atau landasan teori yang memuat :
 - Konsep/teori yang berhubungan dengan obyek masalah yang akan dikaji.
 - Relevansi masalah terhadap teori tertentu.
 - Kerangka pemikiran.
 - Asumsi-asumsi yang dipersepsi.
- Perlu menguraikan pembahasan atau analisis terhadap obyek yang diamati.
- Perlu mencantumkan kesimpulan dan rekomendasi pembahasan.
- Perlu mencantumkan daftar pustaka.
- Daftar pustaka mengikuti pola penulisan karya ilmiah populer (tidak perlu mencantumkan gelar dan disusun secara alfabet serta tidak perlu pakai nomor urut).